

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(PSAP) NOMOR 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



oleh:

Rita Nurhayati
NIM. E20163021

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

JUNI 2023

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH
(PSAP) NOMOR 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TERHADAP TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah



Disusun dan Diajukan oleh:

Rita Nurhayati
NIM. E20163021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Pembimbing :
Dr. Khamdan Rifa'i. S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

JUNI 2023

**Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Oleh:

Rita Nurhayati
NIM. E20163021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si
NIP. 19680807 200003 1 001

**Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)
Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat
Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Akuntansi Syari'ah

Hari : Rabu

Tanggal : 21 JUNI 2023

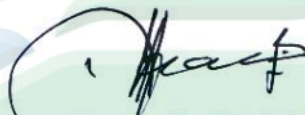
Tim Penguji

Ketua Sidang



Muhammad Saiful Anam, M.Ag
NIP. 197111142003121002


Sekretaris Sidang



Suprianik, SE., M.Si.
NIP. 198404162019032008

Anggota

1. Dr. Nikmatul Masruroh, M.E.I
2. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si



Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si

NIP. 196808072000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-
baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. (QS. An –Nahl ayat 117) *



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah, kemudahan serta kelancaran kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu saya tercinta Bapak Sugito dan Ibu Suriyah, saya ucapkan terimakasih yang tak terhingga telah mendidik dan membesarkan saya. Terimakasih telah memberikan dukungan serta doa yang tiada henti untuk keberhasilan saya.
2. Kedua kakak keponakan dan keluarga yang telah memberikan support sampai saya di titik ini.
3. Terimakasih kepada rekan-rekan kerja yang selalu memberikan dukungan. Dan untuk rekan semasa kuliah.
4. Kepada guru dan dosen saya ucapkan terimakasih untuk kesempatannya dan untuk ilmunya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini meskipun dalam bentuk sangat sederhana. Shalawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang telah memperjuangkan agama Islam sebagai tuntunan hidup di dunia dan akhirat.

Kepada semua pihak penulis merasa berkewajiban menghantarkan ucapan terimakasih serta iringan doa kepada Allah Swt agar diberikan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Rektor UIN KH. Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan dukungan sarana dan fasilitas serta kebijakan yang mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. Khamdan Rifa'i, SE., M.Si, selaku Dosen Pembimbing serta Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan sarana dan dukungan dalam penyelesaian studi seluruh mahasiswa FEBI.
3. Dr. Nur Ika Mauliyah, S.E., M. AK, selaku Koordinator Program Studi

digilib.uinkhas.ac.id Akuntansi Syariah yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam

penyelesaian studi seluruh mahasiswa prodi Akuntansi Syariah.

4. Daru Anondo, M.Si yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kepada seluruh staf karyawan BAPPEDA Banyuwangi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga ketulusan amal bakti yang diberikan kepada penulis senantiasa mendapatkan ganjaran pahala

Jember, 30 MEI 2023

Penulis

RITANURHAYATI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Rita Nurhayati, Dr.Khamdan Rifa'i, S.E., M.Si 2023: Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran adalah suatu standar, pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah.

Fokus penelitian dengan lingkup: 1. Bagaimana Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?, 2. Bagaimana Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui Sejauh Mana Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 2) Untuk mengetahui Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. peneliti menggunakan teknik *purposive Sampling* yaitu pertimbangan dalam pemilihan informan yang dianggap mengetahui informasi terkait yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi, penyajian data dan verifikasi data. Sedangkan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian : 1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) tentang laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuannya. 2. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan Laporan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan jika memang kedua hal tersebut saling berkaitan.

Kata Kunci: PSAP Nomor 2, Realisasi Anggaran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II : KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	25
1. Akuntansi Sektor Publik.....	25
2. Standar Akuntansi Pemerintah.....	27

3. Pernyataan Standar Akuntansi pemerintah.....	32
4. Kesejahteraan Masyarakat atau Sosial.....	48
5. Indeks Pembangunan Manusia.....	49

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Subyek Penelitian.....	52
D. Teknik Pengumpulan Data.....	53
E. Analisis Data.....	55
F. Keabsahan Data.....	57
G. Tahap Penelitian.....	57

BAB IV : PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian.....	60
1 Profil Kabupaten Banyuwangi.....	60
2 Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi.....	63
3 Kependudukan Kabupaten Banyuwangi.....	66
4 Kondisi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi.....	67
5 Visi Misi Kabupaen Banyuwangi.....	68
6 BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi.....	71

B. Penyajian Data dan Analisis Data

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor	
2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Realisasi	
Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	100
a) Akuntansi Anggaran.....	104

b) Akuntansi Pendapatan.....	106
c) Akuntansi Belanja.....	108
d) Akuntansi Transfer.....	109
e) Akuntansi Defisit / Surplus.....	112
f) Akuntansi Pembiayaan.....	113
g) Akuntansi sisa lebih / kurang pembiayaan anggaran.....	115
2. Hubungan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.....	116
a) Kesehatan.....	119
b) Pengetahuan.....	122
c) Ekonomi.....	125
C. Pembahasan Temuan	
1 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	127
2 Hubungan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.....	130

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 135

B. Saran..... 136

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

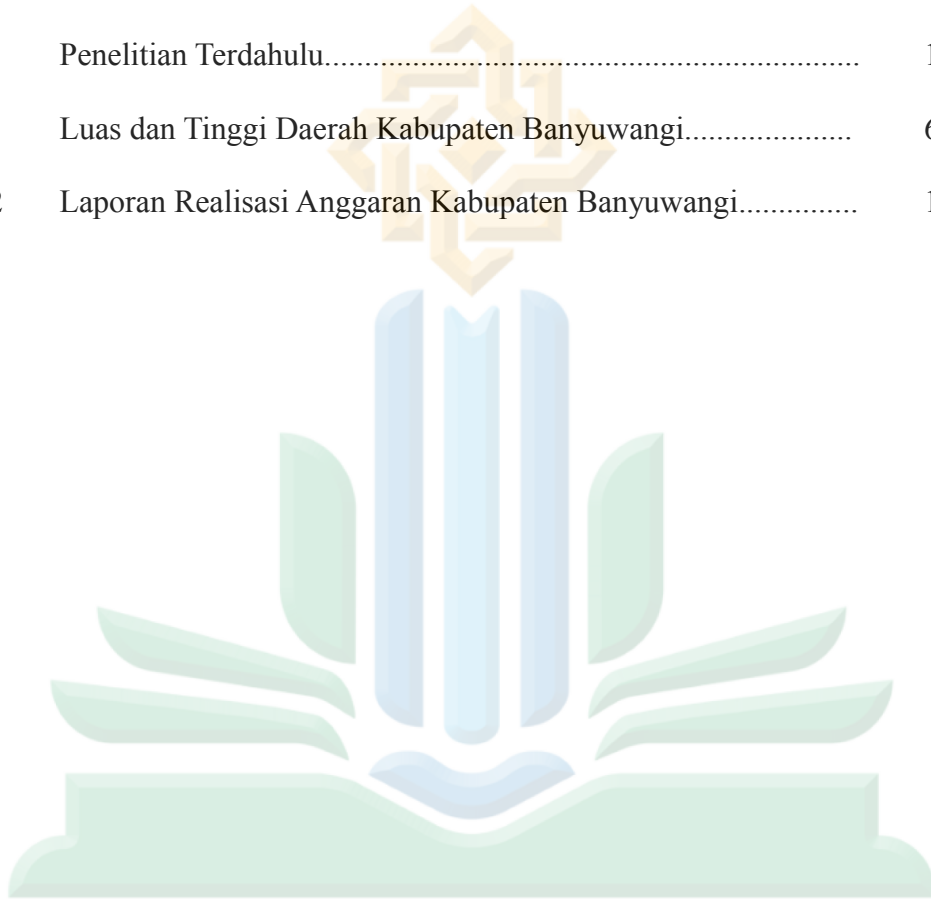
1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Dokumentasi
5. Surat Izin Penelitian
6. Jurnal Penelitian
7. Biodata Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
2.1	Penelitian Terdahulu.....	18
4.1	Luas dan Tinggi Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	64
4.2	Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Banyuwangi.....	102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No.	Uraian	Hal
4.1	Peta Kabupaten Banyuwangi.....	65
4.2	Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	99
4.3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 – 2022.....	118
4.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 – 2022.....	119
4.5	Umur Harapan Hidup Penduduk Kabupaten Banyuwangi 2019 – 2022.....	120
4.6	Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 - 2022.....	123
4.7	Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 – 2022.....	125

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *good governance* merupakan konsep yang dijadikan dasar bagaimana membuat tata kelola pemerintah yang akuntabel, transparan, dan partisipatif menuju sebuah pemerintah yang baik dan bertanggungjawab karena tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pusat dalam bentuk Undang-undang dan Peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah.⁸

Upaya pemerintah untuk dapat menerapkan sistem akuntansi demi mendukung terciptanya *Good Governance* tidaklah mudah. Hal tersebut dikarenakan masih di temukan beberapa kendala, yang pertama adalah karena pemerintah daerah yang sangat familiar dengan sistem anggaran tradisional. Kendala kedua, adalah karena sistem anggaran yang belum berdasarkan kinerja. Dan kendala ketiga, adalah karena masih kurangnya kepedulian para manager di lingkungan pemerintah daerah untuk mendasarkan keputusannya pada informasi keuangan. Dan kendala keempat adalah, berkaitan dengan

⁸ Maulida Oktavani, "Hubungan Penerapan PSAP No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat DiKota Tangerang", (Skripsi: Universitas Bakrie, 2014).

masih terdapat banyak daerah yang tidak memiliki dana untuk memberikan pelayananan minimum bagi masyarakatnya.

Governance sendiri adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan agama pada semua tingkat, pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.⁹

Pola penyajian laporan keuangan di setiap pemerintah daerah adalah sama sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah suatu standar, pedoman, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah baik pusat maupun daerah. Sehingga, dengan adanya Standar Akuntansi ini maka setiap laporan keuangan pemerintah harus disusun berdasarkan standar ini. Dengan adanya Standar Akuntansi

Pemerintahan yang dimaksudkan adalah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga kredibilitas laporan keuangan dapat meningkat serta dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dan *Good Governance* dapat tercapai. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan, yakni peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan.

⁹Yuni Maya Safira, "Penerapan PSAP Nomor 2 (Tentang Laporan Realisasi Anggaran) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Malang, 2014).

Tahun 2010, pemerintah menerbitkan PP No.71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja Pemerintah. Perubahan yang sangat nyata dari SAP sebelumnya yang diatur oleh PP No.24 Tahun 2005 adalah diwajibkannya penggunaan akuntansi berbasis akrual oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dari yang sebelumnya menggunakan akuntansi berbasis kas.

Perbedaan antara PP No.24 Tahun 2005 dengan PP No.71 Tahun 2010 terletak pada basis pencatatan. Pada PP No.24 Tahun 2005 menggunakan pencatatan berbasis kas menuju akrual, yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Sedangkan pada PP No.71 Tahun 2010 mengakui pendapatan, beban, aset, utang, ekuitas, dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan APBN/APBD.

Penyusunan laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai. Pada PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat, telah dilaksanakan sesuai anggaran APBN/APBD, dan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Jika realisasi anggaran dihubungkan dengan kesejahteraan masyarakat yang dapat dihitung dengan Indeks Pembangunan Manusia maka akan terlihat sejauh mana realisasi anggaran memberikan efek langsung kepada masyarakat. Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan agregat Indeks Pembangunan Manusia yang mencerminkan kemajuan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dengan melihat perkembangan angka IPM 5 Tahun terakhir, nampak kemajuan yang dicapai Kabupaten Banyuwangi tidak begitu signifikan. Agregat Indeks Perkembangan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu sebesar 70,06 (2018); 70,06 (2019); 70,62 (2020); 71,38 (2021); 71,94 (2022). IPM tersebut merupakan refleksi pencapaian kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan penduduk dalam catur tahun terakhir.¹⁰

¹⁰<http://bappeda.banyuwangikab.go.id/>, Di Akses Tanggal 2 April 2023 Pukul 15:00.

Upaya Pemkab Banyuwangi dalam meningkatkan mutu kehidupan masyarakat membuahkan hasil. Badan Pusat Statistik (BPS) Banyuwangi mencatat, tahun 2022 IPM di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan sebesar 0,56 dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 IPM Banyuwangi sebesar 71,38. Sedangkan IPM Bumi Blambangan tahun ini meningkat menjadi 71,94. Nilai IPM tersebut dihitung berdasar hasil survei dan data pendukung lainnya yang terkait dengan tiga komponen utama penyusun IPM, yakni kesehatan yang didasarkan pada penilaian indikator usia harapan hidup, pendidikan yang didasarkan pada penilaian indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran yang didasarkan pada indikator pengeluaran *real* per kapita.¹¹. Setiap komponen tersebut memiliki indikatornya masing-masing.

Empat kategori dalam survei IPM. Yaitu rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kategori rendah ketika angka IPM kurang dari 60. Dikatakan sedang jika IPM di *range* 60 sampai 70. Kategori tinggi mulai 70 hingga 80 dan kategori sangat tinggi di atas 80. Dan diketahui Banyuwangi termasuk dalam kategori IPM tinggi, yaitu berada di kisaran 70 sampai 80. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi.”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹² Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan PSAP Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran terhadap laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana hubungan penerapan PSAP Nomor 2 terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu pada masalah-masalah yang telah dirumuskan.¹³ Adapun beberapa tujuan penelitian ini:

1. Mengetahui sejauh mana penerapan PSAP Nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran terhadap laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi?
2. Mengetahui hubungan penerapan PSAP Nomor 2 terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat

¹²Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 60.

¹³Ibid., 61.

teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian harus realitis. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat memberi manfaat dalam rangka mengembangkan Ilmu Ekonomi khususnya Akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang terkait dalam penerapan PSAP Nomor 2. Selain itu penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya mewujudkan akuntabilitas pada laporan Realisasi Anggaran melalui penerapan PSAP.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

Dari judul “Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat”, maka istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan erat dengan penerapan

luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta atau bisnis. Secara kelembagaan, domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara dan daerah, yayasan, universitas, organisasi politik dan organisasi masa, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang aktivitasnya menghasilkan barang dan layanan publik dalam memenuhi kebutuhan dan hak publik.¹⁴

2. Standar Akuntansi Pemerintah

SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.¹⁵ Standar akuntansi Pemerintah adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. Selain itu untuk sistem ini juga diergunakan oleh seluruh aspek ekonomi, mulai dari perusahaan swasta skala besar sampai UMKM. Akuntansi Pemerintah yaitu sistem akuntansi yang dipergunakan oleh negara guna mencatat anggaran finansial dari negara tersebut. Setelah itu, catatan tersebut dijadikan sebagai salah satu alat patokan di saat ini menentukan kebijakan ekonomi negara.

3. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengungkapkan kegiatan pemerintah yang menunjukkan kepatuhan terhadap APBN/APBD dengan menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya

¹⁴Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi, 2009), 2.

¹⁵Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Peraturan Pemerintah No. 24, TLN No. 4503 (2005).

ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

4. Kesejahteraan Masyarakat atau Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.¹⁶

5. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan Indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu Indikator Kesehatan (Indeks Harapan Hidup), Indikator Pendidikan (Indeks Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah) dan Indikator Ekonomi (Daya Beli Penduduk).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang penelitian yang akan dilakukan, maka dipandang perlu untuk memaparkan sistematika penulisan laporan dan pembahasan skripsi sebagai

berikut:¹⁷

Bab I : Pendahuluan, yang di dalamnya terdapat sub bab tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

¹⁶Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Sosial* (2009),

digilib.uinkhas.ac.id 11:lib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

¹⁷Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 68-69.

Bab II : Kajian kepustakaan, berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori tentang hubungan PSAP nomor 2 tentang realisasi anggaran dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Bab III : Metode penelitian, memaparkan tentang pendekatan dan Jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Penyajian data dan analisis data, berisi tentang gambaran obyek penelitian, panyajian data dan analisis, dan pembahasan temuan.

Bab V : Penutup atau kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, sekaligus penyampaian saran bagi pihak-pihak yang terkait.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (Skripsi, Tesis, Disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.¹⁸

1. Nadila Herlinda Agus, 2022, Skripsi, yang Berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Camat Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Kantor Camat Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat telah menerapkan pelaporan LRA sesuai dengan PSAP 02 kecuali untuk akun transfer, pembiayaan dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan atau Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yang

¹⁸ Babun Suharto dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiya*, 45.

disebabkan karena akun tersebut tidak menjadi komponen tugas pokok dan fungsi dari kecamatan Koto XI Tarusan.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tema penelitian yaitu analisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran, adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

2. Yuni Maya Safira, 2016, Skripsi, yang berjudul “Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan hasil analisis yang dipaparkan perlakuan akuntansi pada LRA yang diterapkan oleh Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 2, namun ada beberapa item yang belum diterapkan dikarenakan adanya transaksi terkait.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada fokus penelitian yaitu penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya adalah pada lokasi penelitian.

3. Cristine M.S Tatang, Winston Poto, 2022, Skripsi, yang berjudul “Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat Dprd Kota Manado)”. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado

¹⁹ Nadila Herlinda Agus, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Studi Kasus Pada Kantor Camat Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat”, (Skripsi: Universitas Sumatera Barat, 2022).

²⁰ Yuni Maya Safira, “Penerapan PSAP Nomor 2. Tentang Laporan Realisasi Anggaran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016).

sudah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja. Namun berdasarkan analisis efektifitas masih terdapat fluktuatif tingkat penyerapan anggaran.²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objek penelitian yaitu Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 tentang realisasi anggaran dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

4. Paidi, 2019, Skripsi, yang berjudul “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sertuan)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian

Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan teknik perhitungan daftar checklist dalam rumus Dean J.Champron kesesuaian penerapan dengan PSAP Nomor 2 tentang LRA dinilai baik dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, juga telah menyajikan unsur-unsur LRA, namun dalam penyusunan dan penyajian LRA kantor tidak menyajikan pos-pos

²¹ Cristine M.S Tatang, Winston Poto, “Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat Dprd Kota Manado”, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, Vol. 5 No. 2 Januari - Juni 2022.

transfer, pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih atau kurang anggaran ke laporan perubahan saldo anggaran.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan PSAP Nomor 2 dan jenis penelitian. Adapun berbedaanya terletak pada lokasi penelitian.

5. Nurul Rahmi Sandya, 2018, Skripsi, yang berjudul “Penerapan PSAP Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian LRA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov Sumatera Utara”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pengelolaan LRA Pemerintah Sumatera Utara perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAP Nomor 2.²³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang penerapan PSAP Nomor 2 tentang realisasi anggaran dan jenis penelitian. Adapun perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.

6. Renaldi, 2021, Skripsi, yang berjudul “Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi Bpsdmp”. Hasil penelitian ini menunjukkan Instansi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah menyajikan informasi berupa

²² Paidi, “Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sertuan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019).

²³ Nurul Rahmi Sandya, “Penerapan PSAP Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian LRA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov Sumatera Utara”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2018).

laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Instansi BPPSDMP dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.²⁴

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti tentang penyajian realisasi anggaran yang dilakukan oleh sebuah instansi dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian

7. Yohanna Cresensia Mutiara, Minarni A. Dethan, dan Nikson Tameno, 2022, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kantor imigrasi Kelas I TPI Kupang telah menerapkan PSAP Nomor 2 dalam menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, namun belum diterapkan secara maksimal. Informasi-informasi dalam laporan realisasi anggaran kantor imigrasi kelas I TPI Kupang seperti struktur, nama entitas, Cakupan entitas, periode yang dicakup, periode pelaporan serta ketepatan waktu pelaporan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 2. Namun masih ada beberapa komponen dalam PSAP Nomor 2 yang belum diterapkan dalam laporan realisasi anggaran kantor imigrasi kelas I TPS Kupang.
8. Komponen akuntansi Pendapatan – LRA, Akuntansi belanja, akuntansi transfer, dan akuntansi pembiayaan sudah dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran dan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 2. Sedangkan

komponen akuntansi surplus/defisit – LRA, dan akuntansi kurang lebih/kurang Pembiayaan Anggaran tidak ada dalam laporan realisasi anggaran kantor imigrasi Kelas I TPI Kupang.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan PSAP Nomor 2 dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

9. Albertus Karjono, Riani Sulistianingsih, 2020, *Jurnal Manajemen Bisnis* yang berjudul “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran”. Hasil penelitian ini menunjukkan jika dalam penyusunan laporan realisasi anggaran suku dinas perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Sejak Tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010.²⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan PSAP Nomor 2 dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

10. Amil Ma'Ruf, 2020, Skripsi yang berjudul “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sungai Batang

²⁵ Yohana Crecensia Mutiara, Minami a. Dethan, Nikson Tameno, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol, 1 No 7 Oktober (2022).

²⁶ Albertus Karjono, Riani Sulistianingsih, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran”, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 23 No 3 (2020).

Kabupaten Indragiri Hilir”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dimana kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tidak membuat jurnal yang terpisah antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, semua dicatat dalam jurnal umum serta tidak membedakan antara jurnal finansial dan jurnal anggaran. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir dalam membuat laporan pertanggungjawaban belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang diatur dalam PP No. 71 Tahun 2010 dan PERMENDAGRI Nomor 74 Tahun 2013.²⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan Akuntansi Pemerintah pada sebuah instansi dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

11. Dewi Man Zilatul Hikmah, Skripsi, 2019, yang berjudul “Analisis

Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Terhadap Laporan Keuangan Desa di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan keuangan desa yang ada di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo sudah memenuhi sesuai dengan azas pengelolaan keuangan

²⁷ Amil Ma'ruf, “Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir”, (Skripsi: Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020)

desa dan sudah menerapkan PSAP No. 02 meskipun ada item atau transaksi yang belum ada.²⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti penerapan PSAP Nomor 2 dan jenis penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Nadila Herlinda Agus, Skripsi, 2022	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Psap) 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Camat Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat)	Secara keseluruhan Kantor Camat Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatera Barat telah menerapkan pelaporan LRA sesuai dengan PSAP 02 kecuali untuk akun transfer, pembiayaan dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dan atau Selisih Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) yang disebabkan karena akun tersebut tidak menjadi komponen tugas pokok dan fungsi dari kecamatan Koto XI Tarusan.	Fokus Penelitian Jenis penelitian. sama sama membahas tentang PSAP No 2	Lokasi Penelitian, Kantor Camat Koto Xi Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat.
2	Yuni Maya Safira, 2016	Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Guna	perlakuan akuntansi pada LRA yang diterapkan oleh Kabupaten Pasuruan sudah sesuai dengan PSAP Nomor 2, namun ada beberapa item yang belum diterapkan	Fokus Penelitian Jenis penelitian sama sama membahas tentang	Lokasi Penelitian, pada LRA yang diterapkan oleh Kabupaten

²⁸ Dewi Man Zilatul Hikmah, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02. Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Terhadap Laporan Keuangan Desa di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo", (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2019)

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat	dikarenakan adanya transaksi terkait	PSAP No 2	Pasuruan
3	Cristine M.S Tatang, Winston Poto, Skripsi, 2022.	Evaluasi Penerapan Psap No. 02 Atas Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Kantor Sekretariat Dprd Kota Manado.	bahwa Kantor Sekretariat DPRD Kota Manado sudah menerapkan pos Pendapatan, Belanja, Surplus/Defisit dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran dalam satu periode pelaporan sehingga dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAP No. 02 tentang isi Laporan Realisasi Anggaran, karena Kecamatan Malalayang menerapkan akun sesuai dengan kebutuhan saja. Namun berdasarkan analisis efektifitas masih terdapat fluktuatif tingkat penyerapan anggaran.	Fokus Penelitian sama sama membahas tentang penerapan PSAP No 2, dan Jenis Penelitian	Lokasi Penelitian, Kantor Sekretariat Dprd Kota Manado.
4	Paidi, 2019	Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sertuan)	Penyajian Laporan Realisasi Anggaran dengan menggunakan teknik perhitungan daftar checklist dalam rumus Dean Champron kesesuaian penerapan dengan PSAP Nomor 2 tentang LRA dinilai baik dan dilakukan sesuai peraturan yang berlaku, juga telah menyajikan unsur-unsur LRA, namun dalam penyusunan dan penyajian LRA kantor tidak menyajikan pos-pos transfer, pengeluaran pembiayaan, tidak melakukan pemindahan saldo lebih atau kurang anggaran ke laporan	Fokus Penelitian Jenis penelitian sama sama membahas tentang PSAP No 2	Lokasi Penelitian, Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus pada Kantor Kepala Desa Amplas Kecamatan Percut Sertuan)

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			perubahan saldo anggaran.		
5	Nurul Rahmi Sandya, 2018	Penerapan PSAP Nomor 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam Penyajian LRA pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Prov Sumatera Utara	Pengelolaan LRA Pemerintah Sumatera Utara perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAP Nomor 2	Sama sama membahas tentang PSAP No 2	Lokasi Penelitian, Pengelolaan LRA Pemerintah Sumatera Utara
6	Renaldi, Skripsi, 2021	Analisis Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pada Instansi Bppsdmp.	Instansi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) telah menyajikan informasi berupa laporan keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Instansi BPPSDMP dan dilaporkan pada pihak yang bertanggung jawab.	penyajian realisasi anggaran yang dilakukan oleh sebuah instansi dan jenis penelitian	Lokasi Penelitian, di Instansi Bppsdmp
7	Yohanna Cresensiana Mutiara, Minarni A. Dethan, dan Nikson Tameno, 2022	Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang telah menerapkan PSAP Nomor 2 dalam menyusun dan menyajikan laporan realisasi anggaran, namun belum diterapkan secara maksimal.	Fokus Penelitian Jenis penelitian Membahas Tentang PSAP No 02	Lokasi Penelitian, Membahas (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
8	Albertus Karjono, Riani Sulistiani Ngsih,	Penerapan Perrnyataan Standar Akuntansi Pemerintah	laporan realisasi anggaran suku dinas perhubungan kota administrasi jakarta utara sudah mengacu pada	Fokus Penelitian Jenis penelitian Membahas	Lokasi Penelitian, laporan realisasi anggaran

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Jurnal Manajemen Bisnis, 2020	(PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran	pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas sejak tahun 2015, sesuai dengan aturan dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010.	Tentang PSAP No 02	suku dinas perhubungan kota administrasi jakarta
9	Amil Ma'ruf, Skripsi, 2020	Analisis Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir.	Penerapan Akuntansi Keuangan Pemerintah pada Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Dimana kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir tidak membuat jurnal yang terpisah antara penerimaan kas dan pengeluaran kas, semua dicatat dalam jurnal umum serta tidak membedakan antara jurnal finansial dan jurnal anggaran.	Membahas Penerapan Akuntansi Pemerintah, dan jenis Penelitian	Lokasi Penelitian di Kantor Camat Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir
10	Dewi Man Zilatul Hikmah, 2019, skripsi	“Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Terhadap Laporan Keuangan Desa (Desa Condong	Laporan keuangan desa yang ada di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo sudah memenuhi sesuai dengan azas pengelolaan keuangan desa dan sudah menerapkan PSAP No. 02 meskipun ada item atau transaksi yang belum ada	Fokus Penelitian Jenis penelitian Membahas Tentang PSAP No 02	Lokasi Penelitian , membahas PSAP No 2 di Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo) ”

No	Nama	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo)”			

Sumber: Data diolah dari Penelitian Terdahulu

B. Kajian Teori

1. Akuntansi Sektor Publik

a. Pengertian Akuntansi

Menurut *Financial Accounting Standart Board* (FASB) tahun 1973 adalah pengetahuan badan dan fungsinya terkait dengan sistematika pencatatan, pengklasifikasian, pengolahan, peringkasan, penganalisisan, penafsiran, dan tuntunan informasi yang andal dan signifikan meliputi, transaksi, dan kejadian-kejadian yang terkait, yang diperlukan oleh manajemen dan operasionalisasi suatu entitas dan untuk pelaporan yang harus disampaikan guna memenuhi *fiduciary* dan tanggung jawab lainnya.²⁹ Sedangkan menurut *American Accounting Association* (1966) definisi akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-

²⁹Arfan Ikhsan, *Pengantar Akuntansi* (Bandung: Citapusaka Media, 2014), 17.

pihak yang memerlukan.³⁰ Dari kedua definisi tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- 1) Fungsi akuntansi adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas pelaku ekonomi.
- 2) Informasi yang dihasilkan oleh akuntansi yang dimaksud agar berguna sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan ekonomi yang rasional.

b. Pengertian Sektor Publik

Sektor publik muncul dalam berbagai bentuk di dalam masyarakat, diantaranya adalah sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Selain itu, adapula yang menjalankan aktivitas lainnya seperti yayasan, lembaga-lembaga keagamaan, LSM, partai politik, rumah sakit, dan lembaga pendidikan.

Istilah sektor publik sendiri memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan kosekuensi dari luasnya wilayah

publik sehingga setiap disiplin ilmu memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Dari sudut pandang perekonomian pemerintah sektor

public adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan

publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk

publik dibayarkan melalui pajak dan pendapatan Negara

lainnya yang sudah diatur dalam hukum.³¹ Sedangkan menurut

³⁰Nunuy Nur Afiah, *Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kencana, 2010), 5.

³¹V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 1.

Abdul Halim yang dimaksud dengan sektor publik adalah pemerintah dan unit-unit organisasinya yaitu unit-unit yang dikelola pemerintah dan berkaitan dengan hajat hidup orang banyak atau pekayanan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.³²

Melalui pengertian sektor publik yang ada dapat disimpulkan bahwa pengertian akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya.

Setelah mengetahui definisi dari akuntansi sektor publik, maka perlu diketahui tujuan dari akuntansi sektor publik menurut *American Accounting Association* adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis mengenai alokasi suatu sumber daya yang di percayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manager untuk melaporkan pelaksanaan tanggungjawab secara tepat dan efektif.

Program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenang

dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan akuntabilitas.

2. Standar Akuntansi Pemerintah

a. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah.³³ Dijelaskan juga pada pasal 1 ayat (11) SAP adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Menurut Wijaya dengan adanya standar ini maka Laporan Keuangan Pemerintah yang merupakan hasil dari proses akuntansi diharapkan dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara pemerintah dengan stakeholders sehingga tercipta pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.³⁴ Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan pedoman untuk menyatukan persepsi antara penyusun, pengguna, dan auditor Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyajikan Laporan Keuangan sesuai SAP. Penggunaan Laporan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.³³Peraturan Pemerintah, *Standar Akuntansi Pemerintah* No 71 Tahun 2010. digilib.uinkhas.ac.id

³⁴Wijaya, Henryanto, *Standar Akuntansi Pemerintah*, *Jurnal Akuntansi*, X II No. 3 (2010).

Keuangan termasuk legislatif akan menggunakan SAP untuk memahami informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan dan eksternal auditor akan menggunakannya sebagai kriteria dalam pelaksanaan audit. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

b. Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua

Pemerintah telah dua kali menetapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, pertama adalah PP Nomor 24 Tahun 2005 dengan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) yang diawali dengan kerangka konseptual Akuntansi Pemerintah. Kedua adalah PP Nomor 71 Tahun 2010, yang merupakan peraturan yang menetapkan Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun dengan berlandaskan pada basis akrual.³⁵ PSAP berbasis akrual disajikan dengan diawali dengan kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah. PP No. 71 Tahun 2010

pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa:

“Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD”³⁶

Dalam akuntansi akrual ini, entitas pelaporan harus dapat menyajikan 7 (tujuh) jenis Laporan Keuangan. Dalam PSAP berbasis

³⁵Nurul Rahmi Sandya, “Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.2 Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam Penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Provinsi Sumatra Utara”, (Skripsi: Universitas Medan Area, 2018)

³⁶Peraturan Pemerintah, *Tentang Standar Akuntansi Pemerintah* Nomor 71 Tahun 2010.

akrual, Laporan Keuangan dikelompokkan ke dalam dua kelompok laporan yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang masih menggunakan basis kas dan laporan kelompok finansial yang sudah menggunakan basis akrual. Dalam laporan finansial terdapat Laporan Operasional yaitu laporan pelaksanaan anggaran yang disajikan dengan menggunakan basis akrual. Dari kesimpulan di atas, dapat dinyatakan bahwa PP Nomor 71 Tahun 2010 memiliki pengertian yang berbeda. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah jika menggunakan basis akrual, dimana dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengindikasikan adanya penerapan dua basis yang berbeda (khusus dan akrual) dalam dua pelaporan yang berbeda (pelaporan finansial dan pelaporan anggaran).

c. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

Asian Development Bank (ADB) dalam dokumen yang berjudul "*Accrual Budgetting and Accounting in Government and its Relevance for Developing Member Countries*" menyajikan bahwa

penerapan basis akrual dapat dilakukan dengan dua metode atau strategi yaitu metode *big bang* atau perubahan secara radikal dengan metode bertahap. Namun sampai saat ini metode *big bang* sangat jarang digunakan.

Menurut Mulyana penerapan basis akrual dapat dilakukan secara top-down atau bottom-up.³⁷ Apabila diterapkan secara top-down biasanya penerapan basis akrual dilakukan secara *mandatory* (wajib)

untuk semua entitas dalam rentang waktu yang pasti. Sedangkan bila diterapkan secara *bottom-up* harus dilakukan pilot project terlebih dahulu pada entitas tertentu, untuk meyakinkan bahwa basis akrual dapat dilakukan dengan baik. Penerapan secara *bottom-up* dapat dilakukan dengan *timeframe* pendek maupun *timeframe medium*. Penerapan akuntansi dengan *timeframe* pendek akan berisiko timbulnya *reform fatigue*, yaitu hilangnya *sense of urgent* dan antusiasme dari para penyelenggara akuntansi. Untuk mengatasi resiko itu, maka disarankan agar penerapan basis akrual dilakukan secara bertahap dalam *timeframe medium* (4-6 tahun), penerapan ini terlebih dahulu diterapkan kepada beberapa entitas akuntansi tertentu di Pemerintah Pusat yang sudah dianggap siap dalam proses akuntansinya, sebagai *pilot project*, apabila *pilot project* sudah berhasil, maka pengalaman-pengalaman praktek akuntansi akrual ini dapat ditransfer dan digunakan sebagai bahan sosialisasi ke instansi-instansi pemerintah lainnya untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual agar sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Maka diperlukan sebuah strategi dan rencana kerja untuk memandu pelaksanaan penerapan SAP tersebut.

d. Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah

Terbitnya SAP ini menunjukkan peran penting akuntansi dalam pelaporan keuangan di pemerintahan. UU Nomor 17 Tahun 2003 yang mulai berlaku sejak Tahun 2003 menyebutkan dengan jelas bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disajikan sesuai dengan SAP. Selanjutnya UU Nomer 1 Tahun 2004 juga menyebutkan arti penting Standar Akuntansi Pemerintah bahkan memuat mengenai Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sebagai penyusun SAP yang keanggotaannya ditetapkan dengan Kepres UU No.32 Tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan SAP.

Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Kementerian Keuangan, mulai mengembangkan Standar akuntansi, seperti dalam organisasi komersial, para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah pun membutuhkan informasi untuk mengelola organisasinya. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan suatu standar

akuntansi dibidangnya sendiri dalam menjalankan aktivitas layanan kepada masyarakat luas. Dari uraian yang ada, dapat disimpulkan bahwa SAP merupakan jawaban atas penantian adanya pedoman pelaporan keuangan yang dapat berterima umum.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP)

a. Tujuan dan Ruang Lingkup

Tujuan pelaporan Realisasi Anggaran adalah memberikan

b. Manfaat Realisasi Informasi Anggaran

Menurut PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima

untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;

Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.³⁸

c. Struktur Laporan Realisasi Anggaran

Menyajikan informasi Realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman pelaporan, jika dianggap perlu, informasi berikut: Nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya; Cakupan entitas pelaporan; Periode yang dicakup; Mata uang pelaporan; dan Satuan angka yang digunakan.

d. Periode Pelaporan

Dalam PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Realisasi Anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi sebagai berikut:

Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Realisasi Anggaran dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Manfaat suatu Laporan Realisasi Anggaran berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Faktor-faktor

³⁸ Albertus Karjono, Riani Sulistianingsih, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 23 No 3 (2020).

seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Suatu entitas pelaporan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

e. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya³⁹. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan pengguna sumber daya ekonomi.
2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas pengguna anggaran, sehingga penyimpangan yang telah terjadi dapat diantisipasi dimasa mendatang.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk menandai kegiatan pemerintah pusat dan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
³⁹Yanti, "Penerapan PSAP No 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara", (Skripsi: Universitas Sumatera Utara, 2015)

daerah dalam periode mendatang dengan cara menyediakan laporan secara komperatif.⁴⁰

Laporan Realisasi Anggaran merupakan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang telah diterima secara umum. Hal tersebut diatur dalam undang-undang No.17 Tahun 2003, tentang keuangan negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat. Di laksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD/APBN) dan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan Pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer,

⁴⁰Paidi, "Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor.02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Amplas)", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019)

surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Periode pelaporan laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun, LRA mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat atau daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD.⁴¹

f. Isi Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang

digilib.uinkhas.ac.id ⁴¹ Albertus Karjono, Riani Sulistianingsih, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 23 No 3 (2020). has.ac.id

material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos Akuntansi Pendapatan dan Belanja. Pendapatan-LRA menurut PSAP No.2 Paragraf 7 adalah semua penerimaan rekening kas umum Negara/daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Akuntansi pendapatan-LRA menurut PSAP No.2 Paragraf 24, 25, 27, 28, 29, dan 30 dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang.⁴²

Recurring atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*nonrecurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang saldo

⁴² Albertus Karjono, Riani Sulistianingsih, "Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran", *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol 23 No 3 (2020).

membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (*allotment*). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saat anggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.

2) Akuntansi Pendapatan – LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan

layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

3) Akuntansi Belanja

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit

umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tak terduga. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat

diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah. Contoh klasifikasi belanja menurut ekonomi (jenis belanja) adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

1. Belanja Pegawai xxx
2. Belanja Barang xxx
3. Bunga xxx
4. Subsidi xxx
5. Hibah xxx
6. Bantuan Sosial xxx

Belanja Modal:

1. Belanja Aset Tetap xxx
2. Belanja Aset Lainnya xxx
3. Belanja Lain-lain/Tak Terduga xxx
4. Transfer xxx 28

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di lingkungan pemerintah pusat antara lain belanja per kementerian negara/lembaga beserta unit organisasi di bawahnya. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah

daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dinas pemerintah tingkat.

Provinsi/kabupaten/kota, dan lembaga teknis daerah 1 provinsi/kabupaten/kota. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contoh klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja:

1. Pelayanan Umum xxx
2. Pertahanan xxx
3. Ketertiban dan Keamanan xxx
4. Ekonomi xxx
5. Perlindungan Lingkungan Hidup xxx
6. Perumahan dan Permukiman xxx
7. Kesehatan xxx
8. Pariwisata dan Budaya xxx
9. Agama xxx
10. Pendidikan xxx
11. Perlindungan sosial xxx

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas

pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

6) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan *obligasi* pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran) Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

7) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan. Pengeluaran

pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

8) Akuntansi Pembiayaan Neto

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

4. Kesejahteraan Masyarakat atau Sosial

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan

Sosial mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai berikut:

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Sesuai dengan UU tersebut, maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial bertujuan:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian

- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggara kesejahteraan sosial.

Pihak yang bertanggungjawab dalam memenuhi tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut adalah pemerintah yang dilaksanakan oleh menteri, dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh gubernur, untuk tingkat provinsi dan bupati atau walikota untuk tingkat kabupaten/ kota. pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, begitu pula penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada pemerintah daerah.⁴³ Oleh karena itu, pemerintah daerah bertanggungjawab mengalokasikan

anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang pelaksanaannya perlu diawasi agar tujuan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5. Indeks Pembangunan Manusia

⁴³Maulida, Oktafiani, "Hubungan Penerapan PSAP No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kota Tangerang", (Skripsi: Universitas Bakrie 2015).

IPM merupakan Indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu Indikator Kesehatan (Indeks Harapan Hidup), Indikator Pendidikan (Indeks Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah), dan Indikator Ekonomi (Daya Beli Penduduk). Perhitungan IPM merupakan formula yang digunakan oleh UNDP (United Nation Development Program) sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah/negara dan memublikasikannya dalam laporan tahunan Human Development Report (HRD). IPM merupakan indikator yang cukup baik, karena mencakup tiga sektor pembangunan yang dominan dan memiliki andil yang cukup besar dalam membentuk kualitas SDM.⁴⁴

a) Kesehatan

Kesehatan sebagai salah satu dimensi untuk mengukur Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dimensi ini merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat maka

akan semakin baik dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Dimensi kesehatan dapat diukur dengan menggunakan Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Mencerminkan derajat kesehatan masyarakat sebagai indikator peluang lama usia hidup

b) Pengetahuan

Pendidikan yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan

⁴⁴Ibid.,

melahirkan generasi yang cerdas dan kompeten. Meningkatnya angka harapan sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk wilayah yang bersekolah.

c) **Ekonomi**

Dimensi ekonomi disini adalah standar hidup layak yang mewakili kualitas hidup manusia yang direpresentasikan dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Standar hidup layak diukur melalui nilai pengeluaran perkapita dan kemampuan daya beli. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi secara ekonomi tercermin dari indeks pengeluaran atau indeks daya beli.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.⁴⁵ Penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan.

Alasan peneliti menggunakan penelitian kualitatif pada penelitian ini karena dalam penelitian ini peneliti mengambil data berupa keterangan, catatan, dokumen

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi bertempat di kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang berada di Wilayah Kabupaten Banyuwangi. Alasan peneliti memilih Kabupaten Banyuwangi adalah karena setelah peneliti melakukan penelitian ringan terkait dengan Indeks Pembangunan Masyarakat Kota Banyuwangi di ketahui bahwa dalam rentang tahun 5 Terakhir Kota Banyuwangi telah mengalami kenaikan Persentase IPM secara berkala, dari hal tersebut peneliti ingin mengetahui apakah laporan tersebut telah menerapkan PSAP No. 02 tentang

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfaberta, 2015), 8.

C. Subyek Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti, oleh karenanya seorang peneliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data. Subyek atau informan dalam penelitian ini secara khusus diidentifikasi dengan dasar bahwa data yang dikumpulkan akan memiliki variasi yang lengkap dan akan mencakup pihak-pihak yang diyakini paling mengetahui dan memahami fenomena tersebut. Ketika mengidentifikasi informasi, peneliti menarik beberapa pertimbangan, seperti:

1. Informan mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti.
2. Informan bersifat netral

Beberapa informan tersebut adalah:

1. Staff Bappeda : Asmuni (JP – Pengadministrasian Keuangan)
2. Staff Bappeda : Lestary P, S.Sos (JP – Analisis Rencana Progam dan Kegiatan)
3. Staff Bappeda : Septian Rizki Hidayat, SE (JP – Analisis Perencanaan)
4. Staff Bappeda : Zharifah W.N, A.Md.Stat (JP – Pengelola Progam dan Kegiatan)

Pemilihan subjek penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive* yaitu pengambilan teknik sumber data dengan pertimbangan tertentu dengan tujuan untuk menentukan infomasi kunci. *Purposive* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini misalnya instansi tersebut dianggap paling tahu apa yang diharapkan peneliti, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau sesuatu yang akan diteliti.⁴⁶

D. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang mempunyai kredibilitas tinggi dipengaruhi salah satunya ialah Teknik pengumpulan data yang digunakan. Penggunaan teknik pengumpulan data yang salah berakibat fatal, karena tidak menghasilkan data yang kredibel. Hal ini akan berpengaruh pada hasil penelitian berakhir dengan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak mempunyai kredibilitas.⁴⁷

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala subyek atau obyek yang diselidiki, baik dalam situasi yang khusus yang sengaja diadakan.

Penelitian menggunakan teknik observasi nonpartisipan. Dalam hal ini, peneliti hanya sebagai pengamat atau observer yaitu peneliti datang ketempat penelitian, namun peneliti tidak terlibat langsung dengan kegiatan tersebut. Agar hasil observasi dapat direkam dengan baik, peneliti menggunakan alat pencatat dan alat perekam kegiatan.

2. Teknik Wawancara

⁴⁶Ibid.,
⁴⁷Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019), 30.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.⁴⁸ Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berada di kantor BAPEDA Kabuapten Banyuwangi.

Jenis wawancara ini adalah wawancara semi struktur. Dimana dalam hal ini peneliti menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dengan menanyakan lebih lanjut. Wawancara semi struktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka.⁴⁹

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data dengan cara mempelajari dokumentasi yang ada, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, buku atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁰ Dokumen yang diperlukan berupa dokumen yang menggambarkan keterangan tentang sumber data primer baik berupa catatan maupun data yang berkaitan dengan penelitian. Melalui metode ini data yang ingin diperoleh peneliti adalah dokumen yang diperlukan berupa dokumen yang menggambarkan keterangan

⁴⁸ Sugiyono, *Metode* 72. digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

⁴⁹ Ibid., 27.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 129.

tentang sumber data primer baik berupa catatan, foto, yang berkaitan dengan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami orang lain.⁵¹

Menurut Miles dan Huberman, teknik analisis data kualitatif terdiri dari komponen utama reduksi data, penyajian, dan inferensi.⁵²

1. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya untuk membuang yang tidak perlu. Tujuan dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama pencarian data di lapangan. Maka dalam hal ini, peneliti menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan penelitian. Sehingga tujuan penelitian tidak hanya untuk menyederhanakan data tetapi juga untuk memastikan data yang diolah itu merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.⁵³ Selain itu peneliti akan merangkum hasil observasi dan dokumen yang menyangkut fokus masalah dalam penelitian.

2. Penyajian Data

⁵¹ Sugiyono, *Metode* 85.

⁵² Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), 15. digilib.uinkhas.ac.id

⁵³ Sandu Siyoto, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-123.

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi biaya. Rangkuman data yang diperoleh peneliti dari hasil observasi, wawancara kepada seluruh narasumber dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk naratif.

3. Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisis data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar penelitian tersebut.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah berada di lapangan. Tahap akhir yang akan dilakukan peneliti adalah menyimpulkan hasil akhir penelitian berupa *data display*.

Bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data temuan di lapangan. Agar diperoleh yang absah, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik keabsahan data seperti perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, observasi secara mendalam, triangulasi metode (menggunakan beberapa sumber, metode, peneliti, teori).⁵⁴

Teknik yang digunakan peneliti lebih berfokus pada triangulasi sumber. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.⁵⁵

G. Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian kualitatif. Prosedur penelitian yang akan dilakukan meliputi studi pendahuluan, perencanaan, pelaksanaan analisis dan interpretasi, penyusunan laporan penelitian. Tahapan-tahapan pelaksanaan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Tahap Studi Pendahuluan dan Pra-lapangan

Tahap yang dilakukan sebelum penelitian dilaksanakan. Kegiatan dalam tahap pra-lapangan meliputi menyusun rancangan penelitian, studi eksplorasi, perizinan, penyusunan instrument penelitian, dan pelaksanaan.

a) Menyusun rancangan penelitian.

b) Studi eksplorasi

⁵⁴Babun Suharto dkk, *Pedoman Karya Ilmiah* 47.

⁵⁵Basrowi, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 84-85.

Merupakan kunjungan ke lokasi penelitian, yaitu Badan Perencanaan dan pembangunan Daerah di Kabupaten Banyuwangi sebagai lokasi penelitian, dan berusaha mengenal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan lokasi penelitian.

c) Perizinan

Pertama yang harus diketahui oleh peneliti adalah siapa saja yang berkuasa dan berwenang dalam memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian. Selain mengetahui siapa yang berwenang, segi lain yang perlu diperhatikan ialah persyaratan yang diperlukan. Seperti surat tugas, surat izin instansi di atasnya, identitas diri, peelengkapan yang akan digunakan, daslain sebagainya. Maka pelaksanaan penelitian ini memerlukan izin dengan prosedur sebagai berikut, yaitu meminta surat izin penelitian dari IAIN Jember sebagai permohonan izin melakukan penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

d) Penyusunan instrument penelitian

Kegiatan dalam penyusunan instrumen penelitian meliputi penyusunan daftar pertanyaan untuk wawancara, membuat lembar observasi, dan pencatatan dokumen yang diperlukan.

e) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan inti dari penelitian, yaitu meliputi kegiatan pengumpulan data, penyajian data, dan terakhir yaitu kesimpulan atau verifikasi. Pengumpulan data

dilakukan dengan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

2. Penyusunan Laporan

Laporan yang dimaksudkan adalah menulis laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Laporan hasil penelitian ini sebagai pertanggung jawaban ilmiah peneliti dalam penyusunan skripsi. Laporan yang telah ditulis dikondultasikan pada dosen pembimbing. Bila dosen pembimbing menyetujui untuk diuji, maka penulis siap mempertanggung jawabkan isi tulisan dihadapan dewan penguji. Setelah mendapatkan pengesahan dari dewan penguji maka laporan penelitian siap untuk dicetak menjadi laporan skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Kabupaten Banyuwangi

Sejarah Banyuwangi tidak lepas dari sejarah Kerajaan Blambangan. Pada pertengahan abad ke-17, Banyuwangi merupakan bagian dari Kerajaan Hindu Blambangan yang dipimpin oleh Pangeran Tawang Alun. Pada masa ini secara administratif VOC menganggap Blambangan sebagai wilayah kekuasaannya, atas dasar penyerahan kekuasaan Jawa bagian timur (termasuk Blambangan) oleh Pakubuwono II kepada VOC. Padahal Mataram tidak pernah bisa menguasai daerah Blambangan yang saat itu merupakan kerajaan Hindu terakhir di Pulau Jawa. Namun VOC tidak pernah benar-benar menancapkan kekuasaannya sampai pada akhir abad ke-17, ketika pemerintah Inggris menjalin hubungan dagang dengan Blambangan. Daerah yang sekarang dikenal sebagai "kompleks Inggris" adalah bekas tempat kantor dagang Inggris.

VOC segera bergerak untuk mengamankan kekuasaannya atas Blambangan pada akhir abad ke-18. Hal ini menyulut perang besar selama lima tahun (1767–1772). Dalam peperangan itu terdapat satu pertempuran dahsyat yang disebut Puputan Bayu sebagai usaha terakhir Kerajaan Blambangan untuk melepaskan diri dari belenggu VOC. Pertempuran Puputan Bayu terjadi pada tanggal 18 Desember 1771 yang akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Banyuwangi. Sayangnya, perang ini tidak

dikenal luas dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kompeni Belanda. Namun pada akhirnya VOC-lah yang memperoleh kemenangan dengan diangkatnya R. Wiroguno I (Mas Alit) sebagai Bupati Banyuwangi pertama dan tanda runtuhnya Kerajaan Blambangan. Tetapi perlawanan sporadis rakyat Blambangan masih terjadi meskipun VOC sudah menguasai Blambangan. Itu bisa terlihat dengan tidak adanya pabrik gula yang dibangun oleh VOC saat itu, berbeda dengan kabupaten lainnya di Jawa Timur.

Tokoh sejarah fiksi yang terkenal adalah Putri Sri Tanjung yang di bunuh oleh suaminya di pinggir sungai karena suaminya ragu akan janin dalam rahimnya bukan merupakan anaknya tetapi hasil perselingkuhan ketika dia ditinggal menuju medan perang. Dengan sumpah janjinya kepada sang suami sang putri berkata: "Jika darah yang mengalir di sungai ini amis memang janin ini bukan anakmu tetapi jika berbau harum (wangi) maka janin ini adalah anakmu". Maka seketika itu darah yang mengalir ke

dalam sungai tersebut berbau wangi, maka menyesal sang suami yang dikenal sebagai Raden Banterang ini dan menamai daerah itu sebagai

Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang merupakan daerah penghasil perkebunan; dataran rendah dengan berbagai potensi produk hasil

ke selatan sebagai daerah penghasil biota laut. Kabupaten Banyuwangi mempunyai luas wilayah 5.782,50 km² yang merupakan daerah kawasan hutan. Area kawasan hutan ini mencapai 183.396,34 ha atau sekitar 31,72%, persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44%, perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21%, permukiman dengan luas sekitar 127.454,22 ha atau 22,04%. Sisanya dipergunakan untuk jalan, ladang dan lain-lainnya.

Panjang garis pantai di Kabupaten Banyuwangi sekitar 175,8 km dengan jumlah pulau sebanyak 10 buah. Kondisi topografi Kabupaten Banyuwangi di bagian barat dan utara pada umumnya merupakan pegunungan, dan bagian selatan sebagian besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah bagian barat dan utara 40°, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila dibandingkan dengan bagian wilayah lainnya. Dataran yang datar sebagian besar mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 15°, dengan rata-rata curah hujan cukup memadai sehingga bisa menambah tingkat kesuburan tanah.

Dataran rendah yang terbentang luas dari selatan hingga utara dimana di dalamnya terdapat banyak sungai yang selalu mengalir sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat 35 DA, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang luas juga berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah. Selain potensi di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi tanaman perkebunan dan kehutanan,serta memiliki potensi untuk dikembangkan

sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber pertumbuhan perekonomian rakyat. Kabupaten Banyuwangi memiliki bentangan pantai yang cukup panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumber daya kelautan dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

2. Batas Wilayah Kabupaten Banyuwangi

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi terletak pada koordinat $7^{\circ}43' - 8^{\circ}46'2''$ Lintang Selatan dan $113^{\circ}53' - 114^{\circ}38'$ Bujur Timur.. Wilayah Kabupaten Banyuwangi cukup beragam, dari dataran rendah hingga pegunungan. Kawasan perbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.344 m) dan Gunung Merapi (2.799 m). Di balik Gunung Merapi terdapat Gunung Ijen yang terkenal dengan kawahnya. Gunung Raung dan Gunung Ijen adalah gunung api aktif.

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan penangkaran penyu. Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas Purwo. Pantai timur Banyuwangi yang menghadap ke Selat Bali merupakan salah satu penghasil ikan terbesar di Jawa Timur. Tepatnya di Kecamatan

Tabel 4.1
Luas Dan Tinggi Daerah Kabupaten Banyuwangi

Nama kecamatan	Ibu/kota kecamatan	Luas wilayah	Tinggi wilayah
Pesanggaran	Sumberagung	802,50	0-1000
Bangorejo	Kebondalem	134,43	0-500
Purwoharjo	Purwoharjo	200,30	0-500
Tegaldelimo	Tegaldelimo	1341,12	0-500
Muncar	Blambangan	146,07	0-100
Cluring	Cluring	97,44	0-500
Gambiran	Wringinagung	66,77	0-500
Srono	Sukomaju	100,77	0-500
Genteng	Genteng Wetan	82,34	0-500
Glenmore	Karangharjo	421,98	0>3000
Kalibaru	Kalibru Wetan	406,76	100-3000
Singonjuruh	Singonjuruh	58,89	0-500
Rogojampi	Rogojampi	48,51	0-500
Kabat	Kabat	94,17	0-500
Glagah	Glagah	76,75	0-1000
Banyuwangi	Banyuwangi	30,13	0-100
Giri	Mojopanggung	21,31	0-500
Wongsorejo	Wongsorejo	464,80	0-3000
Songgon	Tegalarum	301,84	100>3000
Sempu	Sempu	174,83	100-1000
Kalipuro	Kalipuro	310,03	0>3000
Siliragung	Siliragung	95,15	0-1000
Tegalsari	Tegalsari	65,23	0-500
Licin	Licin	169,25	100-3000
Blimbing sari	Blimbingsari	67,13	0-500

Sumber: www.banyuwangikab.go.id

Luas Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km². Dengan Batas-batas yang menandai wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

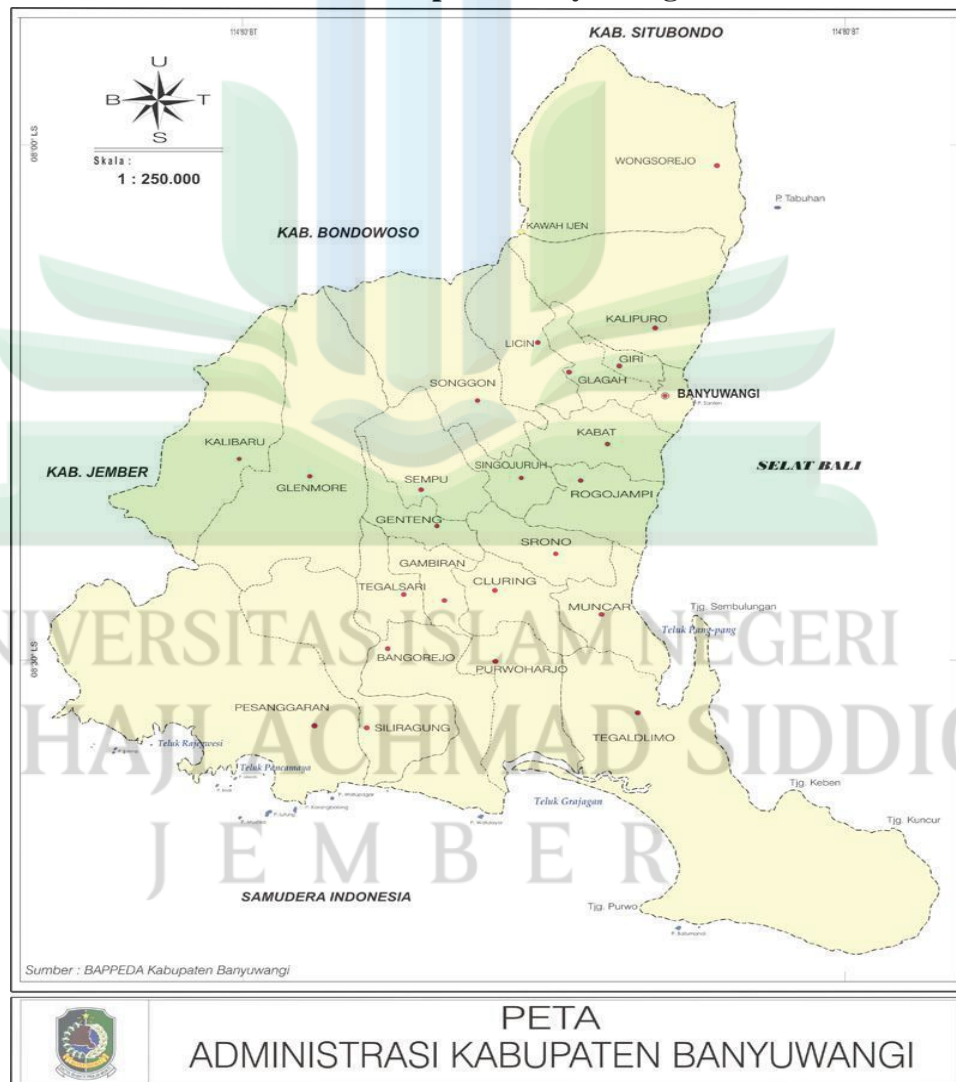
Sebelah Utara: Kabupaten Situbondo

Sebelah Timur: Selat Bali

Sebelah Selatan: Samudera Indonesia

Sebelah Barat: Kabupaten Jember dan Bondowoso

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Banyuwangi



Sumber: www.banyuwangikab.go.id

3. Kependudukan Kabupaten Banyuwangi

Penduduk kabupaten Banyuwangi adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Banyuwangi. Jumlah penduduk Banyuwangi berdasarkan proyeksi pada tahun 2022 yaitu sebesar 1.731.731,4 dengan kepadatan penduduk per km sebesar 299 jiwa/km². Sedang rasio jenis kelamin adalah 99,30. Dari total penduduk tersebut terdiri dari 862.930 jiwa penduduk laki-laki dan 868.801 jiwa penduduk perempuan. Angka kepadatan tertinggi yaitu terletak pada kecamatan Banyuwangi dengan angka kepadatan 3.958 jiwa/km² dan kepadatan terendah yaitu terletak pada kecamatan Tegaldimo dengan angka kepadatan 50 jiwa/km². Kecamatan Banyuwangi memiliki jumlah penduduk tertinggi di wilayah kabupaten Banyuwangi dengan jumlah penduduk per tahun 2022 yaitu sebanyak 119.265 jiwa. Kabupaten Banyuwangi tergolong daerah yang belum padat penduduknya, hal ini dapat dilihat berdasarkan rata-rata setiap km² di Kabupaten Banyuwangi yang didiami sebanyak 289 jiwa.

Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (49,83%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan (50,17%).

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 45-49 tahun (69,29%) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 45-49 tahun.

Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar merupakan

merupakan penduduk usia muda (berusia di bawah 15 tahun) dan 10,02% merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

4. Kondisi Ekonomi Kabupaten Banyuwangi

Jumlah usaha yang tercatat melalui kegiatan Sensus Ekonomi tahun 2006 (SE'06) di Kabupaten Banyuwangi terdapat sebanyak 207.577 usaha diluar sektor pertanian. Berdasarkan jumlah tersebut, 81.629 usaha diantaranya merupakan usaha yang dilakukan di luar bangunan dan umumnya apabila menggunakan bangunan cenderung tidak permanen, sisanya sebanyak 125.948 usaha tergolong usaha yang kegiatannya menggunakan bangunan permanen. Penggunaan bangunan permanen umumnya berupa bangunan khusus untuk usaha dan bangunan campuran atau bangunan yang digunakan untuk usaha sekaligus sebagai tempat hunian. Bangunan tidak permanen dapat berupa usaha kaki lima, los/koridor, pangkalan ojek motor dan berupa pedagang keliling. Usaha yang bergerak disektor perdagangan masih merupakan sektor ekonomi yang paling banyak diminati oleh pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi dengan jumlah mencapai 95.445 usaha. Kedua terbanyak ada pada sektor industri yang jumlahnya tercatat 42.559 usaha. Ketiga sektor jasa-jasa dengan jumlah sebanyak 20.847 usaha. Kegiatan usaha yang menggunakan bangunan tidak permanen yang terdiri atas usaha kaki lima, los/koridor, pangkalan ojek motor dan pedagang keliling seluruhnya tidak

Tenaga kerja yang terserap di berbagai sektor kegiatan usaha jumlahnya mencapai 401.881 orang. Pekerja terbanyak terdapat pada usaha perdagangan besar dan eceran yang jumlahnya mencapai 95.445 orang. Kedua, pada usaha industri pengolahan sebanyak 42.559 orang. Ketiga, bekerja pada usaha jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lain tercatat 20.847 orang dan pada usaha akomodasi dan makan minum ada sebanyak 20.257 orang, selebihnya menyebar diberbagai kegiatan usaha yang ada. Usaha-usaha yang menggunakan lokasi tempat usaha dengan bangunan khusus rupanya menyerap tenaga kerja terbanyak. Usaha yang menggunakan lokasi tempat usaha bangunan campuran berupa rumah hunian juga digunakan untuk usaha telah menyerap tenaga kerja terbanyak kedua. Tenaga kerja sisanya menempati urutan ketiga sebagai pedagang keliling.

5. Visi Misi Kabupaten Banyuwangi

a) Visi “Terwujudnya Banyuwangi Yang Semakin Maju, Sejahtera dan Berkah”

1) Makna “SEMAKIN” yang disematkan dalam Visi Pembangunan ini mengandung nilai dan semangat untuk pencapaian pembangunan 5 tahun kedepan lebih baik dari yang ada saat ini. Tentu menjadi tantangan besar yang harus dijawab oleh pemerintahan saat ini. Dalam titik nol kondisi Banyuwangi yang relatif lebih maju saat ini, maksud dari kata “Semakin” ini harus

dimaknai sebagai kondisi yang lebih. Lebih dalam hal kebaikan di bidang pembangunan.

2) Makna “Semakin Maju” dalam memahami Visi Pembangunan ini diorientasikan pada aspek kemajuan pembangunan ekonomi, kemajuan pembangunan fisik infrastruktur. Kedua aspek inilah yang diharapkan mampu menjadi pengungkit pembangunan di Banyuwangi. Selain itu makna maju juga dapat diartikan sebagai bentuk posisi Banyuwangi yang mampu berdaya saing dalam konstelasi Nasional maupun Global.

3) Makna “Semakin Sejahtera” ini merupakan manifestasi kondisi Banyuwangi yang harmonis kehidupan sosial masyarakatnya dan kondusif kondisi ketentraman dan ketertiban lingkungannya, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai lokalitas budaya dan karakter masyarakat Banyuwangi. Sejahtera dapat pula dimaknai sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, baik secara lahir maupun batin, serta dilaksanakan dengan prinsip keadilan.

Keadilan berkaitan dengan aspek kesempatan yang sama oleh masyarakat baik sebagai objek maupun subjek pembangunan.

4) Makna “Berkah” ini dapat diartikan sebagai karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan atau manfaat bagi kehidupan manusia. Artinya, pembangunan yang diberkahi pastilah akan mendatangkan manfaat dan kebaikan. Keberkahan pasti tidak

bertentangan dengan nilai-nilai moral kehidupan sosial, maka

pembangunan yang diberkahi pasti berdampak pada meningkatnya nilai kesalehan sosial masyarakat.

b) Misi

- 1) Meningkatkan Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian, Perikanan, UMKM, dan Pariwisata Fokus pada Keberdayaan Keluarga untuk Membuka Lapangan Kerja dan Mengurangi Kemiskinan.
- 2) Membangun SDM Unggul, Sehat Jasmani-Rohani, Produktif dan Berkarakter melalui Peningkatan Akses serta Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Kebutuhan Dasar Lainnya.
- 3) Mewujudkan Masyarakat Berkarakter yang Memegang Teguh Nilai-nilai Keagamaan, Menjaga Keluhuran Adat Istiadat, serta Memperkuat Gotong Royong dan Kerukunan dalam Harmoni Kebhinekaan.
- 4) Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Semakin Merata dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan.
- 5) Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Tangkas dan Dinamis melalui Transformasi Digital untuk Mewujudkan Birokrasi Produktif dan Kemudahan Berusaha.⁵⁶

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi

a. Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Banyuwangi

Tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Rincian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi. Tugas Pokok BAPPEDA adalah “membantu bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, pembangunan daerah, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan” terkait dengan tugas pokok tersebut, berikut beberapa fungsi, yakni:

- 1) Penyusunan rencana kerja badan
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pembangunan
- 3) Pelaksanaan-pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
- 4) Pengendalian program pembangunan daerah
- 5) Pelaksanaan perencanaan dan kebijakan perencanaan dan pengendalian
- 6) Penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan
- 7) Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
- 8) Pelatihan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembangan

- 9) Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan
- 10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan pekerjaannya.⁵⁷

b. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi dan masing-masing bidang tugasnya:

1) Kepala BAPPEDA

- 1 menyusun rencana pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan
- 2 melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah dengan perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten serta instansi vertikal di kabupaten;
- 3 menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perubahannya bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- 4 menyusun rencana pembangunan sektoral;
- 5 melaksanakan, memfasilitasi dan pembinaan terhadap kegiatan dibidang penelitian, pengembangan dan perencanaan pembangunan daerah memonitor,

⁵⁷ Bappeda.banyuwangi.go.id (Di akses pada tanggal 7 April 2023, Pukul 04.30)

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan berlaku;

- 6 menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
- 7 melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 8 menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2) Sekretaris BAPPEDA

- 1 mengoordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas dan fungsi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi bidang secara terpadu;
- 2 menyusun rencana program sekretariat berdasarkan rencana kerja badan;
- 3 menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
- 4 mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;

- 5 mengoordinasikan administrasi umum dengan perangkat daerah terkait;
- 6 mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 7 menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pertimbangan karier;
- 8 melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 9 melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris dibantu:

(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

- a. menyusun rencana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan urusan surat-menyurat;
- c. melaksanakan urusan dalam dan ketatalaksanaan urusan kepegawaian;
- d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan:

a. menyusun rencana Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan sesuai dengan rencana kerja badan;

b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;

d. menyusun rencana kebutuhan dan mendistribusikan barang perlengkapan;

e. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai badan;

f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya;

i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada

(3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam:

- a. Menyusun rencana sub bagian penyusunan program sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. Menghimpun bahan dalam rangka perencanaan program, kegiatan dan anggaran badan;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan badan;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja Badan;
- e. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- f. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

- 1 menyusun rencana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- 2 menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah, menyiapkan bahan dan

melaksanakan pengendalian dan monitoring pelaksanaan pembangunan daerah;

3 menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan daerah;

4 menyiapkan bahan dan melaksanakan pelaporan kinerja pembangunan daerah mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

5 menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

6 melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

7 melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan dibantu:

(4) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Perencanaan

b. Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;

c. menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah dan jangka pendek daerah
menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan

- dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Perangkat Daerah;
- d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan

(5) Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengendalian sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan dan hasil pembangunan daerah;
- c. menyusun dan melakukan pengendalian kegiatan pembangunan;
- d. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. menyusun dan menyediakan informasi hasil pengendalian pembangunan;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama

- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(6) Kepala Sub Bidang Evaluasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Evaluasi sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pembangunan daerah;
menyusun dan melakukan analisis data, informasi dan statistika untuk bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- c. menyiapkan bahan pelaporan kinerja pembangunan daerah;
- d. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

4) Kepala Bidang Ekonomi

- 1 menyusun rencana Bidang Ekonomi sesuai dengan rencana kerja Badan;
- 2 menyusun rencana program pembangunan di bidang ekonomi;
- 3 melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan masalahnya;
- 4 menyusun analisa dan kajian kebijakan pembangunan daerah di bidang Ekonomi;
- 5 melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana pembangunan daerah di bidang ekonomi;
- 6 melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah bidang ekonomi;
- 7 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 8 memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- 9 menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 10 melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

11 Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang ekonomi dibantu:

(7) KepalaSub Bidang Pertanian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pertanian sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup pertanian, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan;
- g. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;

- h. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(8) Kepala Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Perindustri, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan pembangunan lingkup koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;

- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan lingkup koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
- f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian, dan perdagangan;
- g. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(9) Kepala Sub Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pariwisata dan Penanaman Modal sesuai dengan rencana kerja Badan;

- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pariwisata dan penanaman modal;
- c. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pariwisata dan penanaman modal;
- d. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan pembangunan daerah lingkup pariwisata dan penanaman modal;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas rencana program pembangunan lingkup pariwisata dan penanaman modal;
- f. menyiapkan bahan *monitoring*, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pembangunan daerah lingkup pariwisata dan penanaman modal;
- g. menyiapkan bahan untuk saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. memberikan petunjuk, arahan dan mengkoordinasikan bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5) Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup

- 1 Menyusun rencana Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana kerja Badan melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup serta merumuskan langkah-langkah pemecahan masalahnya. menyusun kajian kebijakan pembangunan daerah di Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 2 menyusun, mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;
- 3 melaksanakan *monitoring*, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan Bidang Sarana, Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup.
- 4 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 5 mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 6 menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- 7 melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 8 melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan lingkup pekerjaan umum dan permukiman;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup pekerjaan umum dan permukiman;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup pekerjaan umum dan permukiman;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup pekerjaan umum dan permukiman;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan pensinergian rencana program pembangunan daerah lingkup perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;

- f. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- h. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan urusan perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- i. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana pembangunan daerah lingkup perencanaan Pengembangan Wilayah, Perhubungan dan Pertanahan;
- j. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(3) Sub Bidang Perencanaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

- a. menyusun rencana Sub Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan analisa dan kajian kebijakan meliputi energi, kebersihan, pertamanan, limbah, kebencanaan dan lingkungan hidup;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup energi, sumberdaya mineral dan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup energi, sumber daya mineral, lingkungan hidup;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;

- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

6) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan

- 1 menyusun rencana Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- 2 melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan serta merumuskan langkah-langkah kebijakan pemecahan masalahnya;
- 3 menyusun kajian kebijakan dan policy brief pembangunan daerah di Bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;
- 4 menyusun, mengoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan;
- 5 melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan rakyat dan pemerintahan;
- 6 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7 mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;

- 8 menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 9 melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 10 melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(4) Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan meliputi pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kepemudaan dan olah raga, dan perpustakaan;
 - f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
 - g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(5) Kepala Sub Bidang Sosial dan Budaya, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Sosial dan Budaya sesuai dengan rencana kerja badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup sosial, tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan.;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup sosial, tenaga kerja, kebudayaan, transmigrasi dan upaya penanggulangan kemiskinan;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(6) Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur,

- a. menyusun rencana Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan *policy brief* lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;
- d. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan pensinergian rencana program pembangunan lingkup administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, kearsipan, pemerintahan umum dan aparatur;

- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugasnya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

7) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Pembangunan

- 1 menyusun rencana Bidang Penelitian dan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- 2 penyusunan kajian dan policy brief di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 3 penyusunan dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang Sumber Daya Alam dan teknologi;
- 4 koordinasi, evaluasi dan sosialisasi serta publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan dan bidang Sumber Daya Alam dan teknologi;

- 5 memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6 mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- 7 menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- 8 melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 9 melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(1) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;

b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan *policy brief*

Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;

c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan Ekonomi dan Pembangunan;

d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;

- e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

(2) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan:

- a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan policy brief Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan Pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan;

- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan, Sosial budaya dan Kemasyarakatan;
- e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan, Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

(3) Kepala Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya alam dan Teknologi mempunyai tugas:

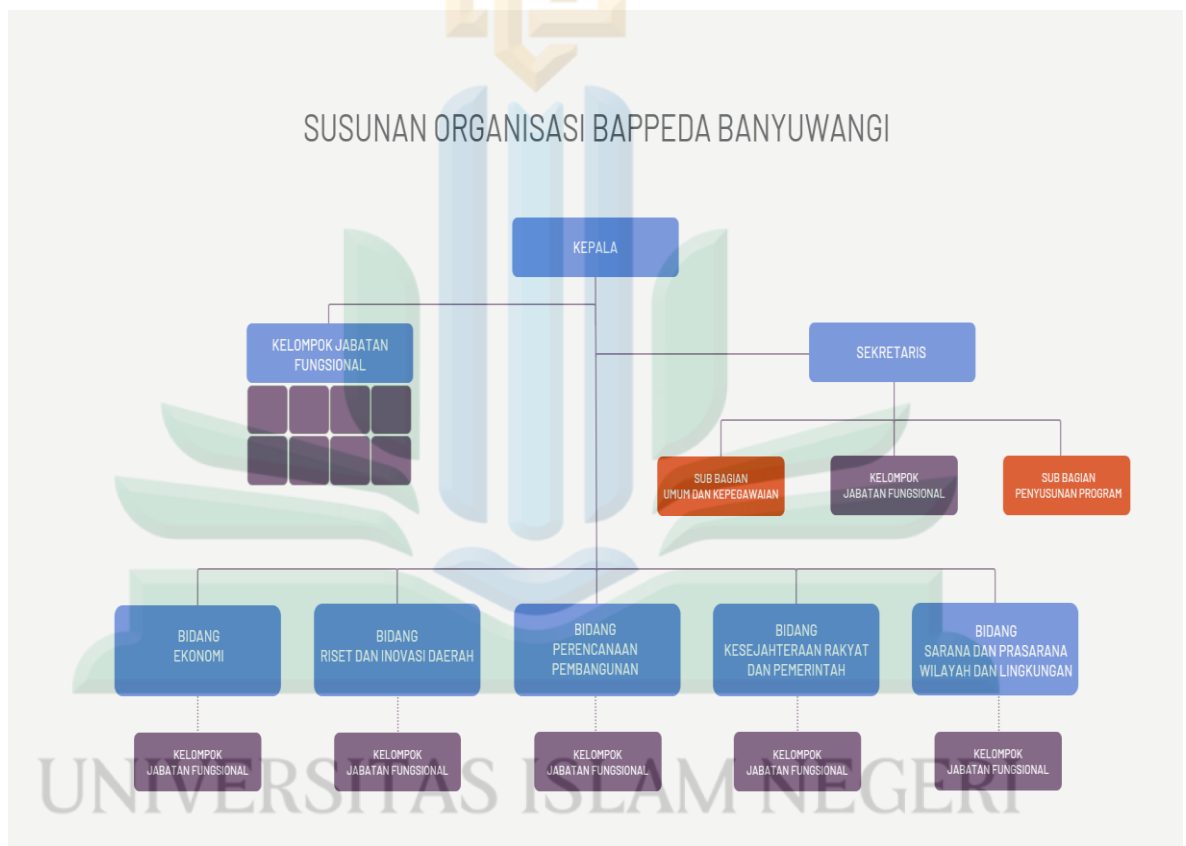
- a. menyusun rencana Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi sesuai dengan rencana kerja Badan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kajian dan policy brief Penelitian dan Pengembangan sumber Daya alam dan Teknologi;
- c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan sumber Daya Alam dan Teknologi;

- d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Sumber Daya alam dan Teknologi;
- e. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi;
- f. mengoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

8) Kelompok Jabatan Fungsional.⁵⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Kabupaten Banyuwangi



Sumber: <https://bappeda.banyuwangikab.go.id/bappeda/halaman/struktur-organisasi/>

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian sesuai dengan metode dan prosedur penelitian yang digunakan dengan sistematis yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data yang relevan. Setiap penelitian haruslah disertai dengan penyajian data sebagai penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan di analisis, sehingga dari data yang dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang SAP poin Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran mengatur tentang pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding.

Laporan Realisasi Anggaran juga menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Pelaporan mencerminkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD. Perbandingan antara anggaran dengan

disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Kabupaten Banyuwangi merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pengelolaan keuangan selama satu tahun periode. Hal tersebut di gunakan untuk menyediakan informasi mengenai keuangan dan transaksi yang dilakukan selama satu tahun. Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA, laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun serta penyajiannya dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan sekali setelah berakhirnya tahun. Bapak Asmuni selaku selaku Staff Pengadministrasian Keuangan Kabupaten Banyuwangi mengatakan:

Laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibuat setiap tahunnya atau satu tahun sekali, hal itu merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas tugas dan fungsi yang selama satu tahun ini sudah di emban. Untuk penyajiannya sendiri kami selalu berusaha untuk tepat waktu agar masyarakat juga dapat segera mengetahui alokasi anggaran selama satu tahun tersebut seperti apa. Adapun biasanya dibuat itu paling lambat maksimal 6 bulan dari tahun berakhir.⁵²

Laporan realisasi anggaran didalamnya menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian wajar, maka entitas pelaporan harus menyajikan penjelasan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan. Berikut adalah laporan realisasi anggaran tahun anggran 2022 Kabupaten

Banyuwangi:

⁵² Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023

Tabel 4.2
PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH				
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	518.001.960.943,00	781.868.807,44	0,15	517.220.092.135,56
4101	Pajak Daerah	202.758.444.613,00	208.923.022,00	0,10	202.549.521.591,00
4102	Retribusi Daerah	73.860.633.768,00	354.866.110,00	0,48	73.505.767.658,00
4103	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.000.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000.000,00
4104	Lain-lain PAD yang Sah	216.382.882.562,00	218.079.675,44	0,10	216.164.802.886,56
42	PENDAPATAN TRANSFER	2.408.739.805.597,00	105.607.008.000,00	4,38	2.303.132.797.597,00
4201	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.300.079.443.000,00	105.607.008.000,00	4,59	2.194.472.435.000,00
4202	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.660.362.597,00	0,00	0,00	108.660.362.597,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	63.230.741.993,00	0,00	0,00	63.230.741.993,00
4301	Pendapatan Hibah	11.982.000.000,00	0,00	0,00	11.982.000.000,00
4303	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	51.248.741.993,00	0,00	0,00	51.248.741.993,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.989.972.508.533,00	106.388.876.807,44	3,56	2.883.583.631.725,56
5	BELANJA DAERAH				
51	BELANJA OPERASI	2.070.759.313.951,00	47.390.010.007,00	2,29	2.023.369.303.944,00
5101	Belanja Pegawai	922.468.149.121,00	47.390.010.007,00	5,14	875.078.139.114,00
5102	Belanja Barang dan Jasa	999.041.095.330,00	0,00	0,00	999.041.095.330,00
5105	Belanja Hibah	134.938.069.500,00	0,00	0,00	134.938.069.500,00
5106	Belanja Bantuan Sosial	14.312.000.000,00	0,00	0,00	14.312.000.000,00
52	BELANJA MODAL	504.235.179.417,00	0,00	0,00	504.235.179.417,00
5201	Belanja Modal Tanah	11.530.000.000,00	0,00	0,00	11.530.000.000,00
5202	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	97.271.544.980,00	0,00	0,00	97.271.544.980,00
5203	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.919.634.537,00	0,00	0,00	96.919.634.537,00
5204	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	287.863.040.345,00	0,00	0,00	287.863.040.345,00
5205	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.650.959.555,00	0,00	0,00	10.650.959.555,00

53	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
5301	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000.000,00
54	BELANJA TRANSFER	410.978.015.165,00	0,00	0,00	410.978.015.165,00
5401	Belanja Bagi Hasil	20.193.979.415,00	0,00	0,00	20.193.979.415,00
5402	Belanja Bantuan Keuangan	390.784.035.750,00	0,00	0,00	390.784.035.750,00
	Jumlah Belanja Daerah	3.005.972.508.533,00	47.390.010.007,00	1,58	2.958.582.498.526,00

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Sisa Anggaran (Rp)
	SURPLUS/(DEFISIT)	(16.000.000.000,00)	58.998.866.800,44	- 368,74	(74.998.866.800,44)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	16.000.000.000,00	330.363.389.713,44	2064,77	(314.363.389.713,44)
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000,00	330.363.389.713,44	1321,45	(305.363.389.713,44)
6101	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya	25.000.000.000	330.363.389.713,44	1321,45	(305.363.389.713,44)
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
6202	Penyertaan Modal Daerah	9.000.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	16.000.000.000,00	330.363.389.713,44		(314.363.389.713,44)
	Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	-	389.362.256.513,88		389.362.256.513,88

Sumber: https://banyuwangikab.go.id/media/anggaran/pdf/ewepxuitlr_4-jan22.pdf

Dari tabel data di atas tentang laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dapat dilihat jika didalamnya sudah menyajikan berbagai unsur dari laporan realisasi anggaran seperti Pendapatan daerah yang terdiri dari beberapa sumber seperti Pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah, ada juga belanja daerah yang terdiri dari belanja operasi, belanja transfer, belanja modal. Dapat dikatakan jika Laporan realisasi anggaran kabupaten banyuwangi telah sesuai dengan PSAP No. 2 tentang

laporan realisasi anggaran. Lebih rinci berikut adalah beberapa poin ada Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan PSAP No. 02.

a. Akuntansi Anggaran

PSAP No. 02 menjelaskan bahwa Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Hal tersebut sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 18 yang menyebutkan jika akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Pernyataan standar akuntansi pemerintah No. 2 tentang Akuntansi

Anggaran. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak Lestary selaku Staff Analisis Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Jember, beliau yang mengatakan:

Pembuatan anggaran untuk satu tahun kedepan harus direncanakan terlebih dahulu. Pemerintah kabupaten banyuwangi biasanya akan membuat perencanaan atau rancangan anggaran terlebih dahulu. seperti alokasi anggaran untuk belanja barang dan jasa, anggaran belanja bantuan sosial, dan belanja tanah dan masih banyak lagi. Hal tersebut bukan hal yang mudah tentunya,

karena kami harus benar-benar pikirkan secara matang dan terkonsep dengan berbagai pertimbangan tentu saja, karena menyangkut.⁵³

Hal serupa juga di sampaikan oleh bapak Septian selaku Staff

Analisis Perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

Pengelolaan keuangan salah satunya adalah Anggaran memang tidak lepas dari yang namanya perencanaan, dari perencanaan yang sudah disepakati baru akan kemudian masuk tahap pelaksanaan, sembari dilaksanakan perlu adanya pengawasan agar rencana-rencana yang sudah dibuat benar terealisasi dengan benar dan tepat setelahnya barulah pada pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan suatu pemerintahan juga tidak akan lepas dari yang namanya akuntansi, dimana dengan diterapkannya akuntansi yang baik dan benar maka sebuah organisasi akan menciptakan suatu sistem yang memiliki akuntabilitas dan transparansi. Dari sini dapat saya katakan jika memang dalam Laporan realisasi anggaran terdapat akuntansi anggaran.⁵⁴

Dan selanjutnya penuturan Ibu Zhariaf sebagai salah satu staff Pengelola Progam dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, beliau mengatakan:

Pendapatan atau dana yang diterima Pemerintah Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya sangat berfariatif. Oleh karena itu untuk menjaga alokasi dana tersebut agar dapat terealisasi dengan baik maka perlu adanya pedoman kerja. Agar pemerintahan ini tidak salah arah. dengan adanya akuntansi anggaran ini diharapkan pemerintah akan lebih mudah dalam mencapai target-target yang telah direncanakan sebelumnya.⁵⁵

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Laporan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 dengan menyajikan informasi terkait akuntansi anggaran, meskipun dari data

⁵³ Lestari, wawancara, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

⁵⁴ Septian, wawancara, Banyuwangi, 15 maret 2023.

⁵⁵ Zhariaf, wawancara, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

laporan masih terlihat belum secara keseluruhan seperti tidak adanya mata uang asing.

b. Akuntansi Pendapatan

Dalam Komite Standar Akuntansi Pemerintah mengakui pendapatan-LRA pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengklasifikasian pendapatan dilakukan berdasarkan jenis pendapatan. Anggaran menjadi sumber pendanaan yang berasal dari APBD yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan), dan lain-lain Pendapatan yang Sah. Adanya transfer masuk dianggap sebagai penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintahan pusat dan dana bagi hasil dari pemerintahan provinsi. Akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah. Bapak

Asmuni selaku staff pengadministrasian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dalam pernyataannya mengatakan:

Laporan realisasi anggaran yang telah dibuat oleh pemerintah kabupaten banyuwangi didalamnya terdapat beberapa poin mengenai pendapatan, mulai dari besaran pendapatan yang diterima, juga jenis atau asal pendapatan tersebut, hal itu untuk memudahkan agar laporan realisasi tersebut lebih mudah di baca tidak hanya oleh kalangan berpendidikan namun juga oleh masyarakat umum.⁵⁶

⁵⁶ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan dari bapak Lestary selaku Staff Analisis rencana dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, beliau mengatakan:

Penerimaan pendapatan kabupaten banyuwangi sendiri seperti yang ada di laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 berasal dari beberapa sumber, seperti dari pendapatan asli daerah yang didalamnya termasuk dari pajak daerah, kemudian ada retribusi daerah, juga hasil pengelolaan kekayaan daerah.⁵⁷

Hal serupa di sampaikan oleh bapak Septian sebagai Staff Analisis Perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Beliau Mengatakan:

Pendapatan setiap tahun jumlahnya bervariasi, mengenai realisasi anggaran sendiri sekurang-kurangnya setahun sekali, ketika pendapatan di terima langsung di salurkan ke daerah – daerah dan di belanjakan sesuai dengan anggaran yang sudah di tetapkan. Anggaran pendapatan yang salurkan sudah sesuai maka harus di gunakan sebaik-baiknya.⁵⁸

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Laporan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan PSAP No. 02 dengan menyajikan informasi terkait akuntansi pendapatan, dari mulai asal pendapatan yakni dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer juga pendapatan daerah yang sah.

⁵⁷ Lestary, wawancara, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

⁵⁸ Septian, wawancara, Banyuwangi, 22 Juni 2023

c. Akuntansi Belanja

Pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) No. 2 mengklasifikasikan belanja menjadi belanja ekonomi, organisasi dan fungsi. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut. Ibu Zhariaf selaku Staff Pengelola Progam dan Kegiatan, beliau bahwa:

Seperti yang bisa di lihat dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 ini kan terdapat belanja, kalau di situ sudah dicantumkan jika belanja itu sendiri menurut klasifikasinya ada 3 ya, ada belanja ekonomi, organisasi dan fungsi. Dan untuk klasifikasi belanja ekonomi meliputi belanja daerah, belanja pegawai, belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain dan ada juga belanja transfer untuk belanja transfer ini seperti belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.⁵⁹

Menambahkan pernyataan diatas, bapak Asmuni selaku Staff

Pengadministrasian yang menyatakan:

Perbedaan dari beberapa macam belanja tersebut adalah untuk belanja operasi adalah adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Lalu untuk belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih biasanya lebih dari satu tahun ya. Lalu untuk Belanja lain-lain/tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang, contohnya seperti bencana alam. Jadi seperti itu perbedaannya.⁶⁰

⁵⁹ Zhariaf, wawancara, Banyuwangi, 15 Maret 2023

⁶⁰ Asmuni, wawancara, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

Hal tersebut juga dikatakan oleh bapak Septian selaku Staff Analisis Perencanaan Pemerintah kabupaten banyuwangi. Beliau Mengatakan.

“Belanja juga digunakan untuk belanja pegawai atau perangkat berupa tunjangan, berupa penyusunan, Penyelenggaraan dan ada juga belanja yang tak terduga. Berdasarkan nominalnya yang di keluarkan sudah sesuai yang dianggarkan”.⁶¹

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Laporan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan PSAP No. 02 dengan menyajikan informasi terkait akuntansi belanja, yang juga terdiri dari beberapa alokasi ada belanja modal, belanja operasi ada juga belanja lain-lain/ tidak terduga.

d. Akuntansi Transfer

Republik Indonesia secara substansial memiliki tiga lingkup sistem pemerintahan, yaitu Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.

Adanya pemerintah yang memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memperoleh pendapatan akan menghasilkan penerimaan pajak atau bukan pajak yang lebih besar. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, hal tersebut menimbulkan kewajiban menyalurkan sebagian pendapatannya kepada pemerintahan yang memiliki kewenangan lebih sempit melalui mekanisme transfer atau yang dikenal dengan sistem desentralisasi fiskal. Pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi

⁶¹ Septian, wawancara, Banyuwangi, 22 Juni 2023

terdapat transfer masuk dan transfer keluar dikarenakan memiliki fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan Daerah.

Sesuai dengan pernyataan di atas, hal tersebut tidak menyalahi aturan PSAP No. 02. Di mana dalam PSAP No. 02 paragraf 23 menjelaskan transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. Lalu dalam PSAP No. 02 paragraf 40 menjelaskan transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam wawancaranya bapak Asmuni selaku Pengadministrasian Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, beliau memberikan pernyataan:

Pemerintahan Pusat dengan cakupan wilayah yang lebih luas akan memberikan supply atau aliran dana pada daerah dengan cakupan wilayah yang lebih sempit, dengan begitu harapannya tugas dan fungsi dari pemerintahan lebih terkonsentrasi terhadap masalah yang dihadapi tiap wilayah. Jadi semisal Kabupaten Banyuwangi ini kan berada atau cakupan wilayahnya lebih kecil jika dibanding dengan Provinsi Jawa Timur, jadi sudah pasti Banyuwangi mendapatkan transferan dana dari situ. Yang tentu saja dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan daerah.⁶²

Hal serupa juga di katakan bapak Ibu Zhariaf selaku Staff Pengelola Progam dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten banyuwangi Beliau mengatakan:

Aliran dana yang di trasfer memiliki jumlah yang sudah di tentukan untuk apa saja untuk Pembangunan dan lain-ain. Dalam

⁶² Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

transfer ada juga yang namanya transfer keluar, yang mana transfer keluar adalah transfer yang disajikan berupa transfer bagi hasil yang meliputi bagi hasil pajak. Dan di Desa Condong sendiri setiap tahunnya ada yang namanya bagi hasil pajak.⁶³

Hal tersebut juga dikatakan oleh bapak Septian selaku Staff Analisis perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan:

Kegiatan Transfer sangat memudahkan transaksi dimana pun, tidak semua ada akses dari daerah-daerah yang dapat langsung memperoleh secara langsung, kadang ada kendala tempat yang di pelosok, jalan yang sulit dilalui. Maka dengan transfer transaksi yang ada di pelosok sangat di mudahkan.⁶⁴

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Laporan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan PSAP No. 02 dengan menyajikan informasi terkait akuntansi transfer.

e. **Akuntansi Defisit / Surplus**

Penerapan anggaran defisit yang sejalan dengan konsep penganggaran berbasis kinerja, memunculkan kecenderungan di pemerintahan daerah untuk mengakomodir lebih banyak kebutuhan publik dan aparatur daerah dalam APBD. Surplus/defisit anggaran adalah selisih antara pendapatan dengan belanja daerah, di mana surplus merupakan selisih lebih (positif) pendapatan di atas belanja dan defisit adalah selisih kurang (negatif) pendapatan di bawah belanja. Sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 47 bahwa selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat

⁶³ Zhariaf, wawancara, Banyuwangi, 22 Juni 2023

⁶⁴ Septian, wawancara, Banyuwangi, 22 Juni 2023

dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 menunjukkan Defisit, dikarenakan semua pendanaan berasal dari anggaran. Maka secara otomatis akan menurunkan ekuitas dari Pemerintah Pusat. Bapak Asmuni selaku Staff Pengadministrasian Keuangan mengatakan:

Jika dilihat dari laporan realisasi anggaran Tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang mengalami defisit, dengan melihat perbandingan antara realisasi atau belanja dengan pendapatan yang diperoleh. Hal ini sama seperti yang terjadi tahun sebelumnya atau tahun 2021 yang mana Pemerintahan Banyuwangi juga mengalami defisit. Bahkan jika dibandingkan dengan tahun 2022 untuk tahun 2021 persentasenya lebih besar.⁶⁵

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Laporan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan PSAP No. 02 dengan menyajikan informasi terkait akuntansi *Surplus / Defisit*.

f. Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. (a) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

⁶⁵ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023

Negara/Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. (b) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah (c) akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Dalam wawancara Bapak Asmani selaku Staff Pengadministrasian Keuangan, beliau memberikan pernyataan:

Pembiayaan dalam Laporan realisasi anggaran kabupaten banyuwangi di ukur berdasarkan nominal dari beberapa transaksi, seperti pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan dan pembiayaan neto. Untuk pengeluaran pembiayaan itu sendiri digunakan untuk pembayaran pinjaman, pemberian pinjaman dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan kabupaten berbentuk kas yang setiap pengeluaran akan di akui ketika sedang melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan.⁶⁶

Adapun pendapat dari ibu Zhariaf Selaku Staff Pengelola Program dan kegiatan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan:

⁶⁶ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

“Setiap Pembiayaan Penerima atau Pengeluaran selalu di cantumkan secara terperinci dalam Laporan Realisasi Anggaran sehingga tidak ada yang terlewatkan dalam pelaporan.”⁶⁷

Menurut hasil analisis yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa Laporan Anggaran Kabupaten Banyuwangi sudah menerapkan PSAP No. 02 dengan menyajikan informasi terkait akuntansi Pembiayaan.

g. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (siKPA / siLPA)

Sikpa/siLPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. PSAP No. 02 paragraf 61 tentang Akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yaitu Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

Dalam laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2022 menunjukkan siLPA Rp. 0. Defisit anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 adalah

sebesar Rp. 16.000.000,- yang kemudian ditutup dengan penerimaan pembiayaan (neto) sebesar Rp. 16.000.000,-. dalam wawancara bersama dengan bapak Asmuni selaku Staff pengadministrasian Keuangan, Beliau mengatakan:

⁶⁷ Zhariaf, wawancara, Banyuwangi, 22 Juni 2023.

“Dalam pelaporan realisasi anggaran pemerintah kabupaten banyuwangi tahun 2022 kemarin menunjukkan SiLPA yang berarti menunjukkan sisa lebih perhitungan anggaran ya.”⁶⁸

Adapun pendapat menurut bapak Lestari selaku Staff analisis Perencanaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Beliau Mengatakan:

“ SILPA/ SIKPA yang selalu sesuai dengan anggaran dalam artian menanggarkan yang akan di gunakan untuk tahun selanjutnya, dengan begitu anggaran akan sesuai tidak lebih dan tidak kurang.”⁶⁹

Hal serupa menurut Ibu Zhariaf selaku Staff pengelola Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Beliau Mengatakan:

“Selisih lebih atau kurang antara Realisasi penting dan pengeluaran selama satu periode di catat dalam pos SILPA/SILPA.”⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa laporan realisasi anggaran yang telah di buat oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menerapkan informasi akuntansi sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran SiKPA / SiLPA.

2. Hubungan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi)”.

Laporan realisasi anggaran bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan realisasi dan anggaran entitas secara tersanding. Menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati

⁶⁸ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023 .id

⁶⁹ Lestari, *wawancara*, Banyuwangi, 22 Juni 2023

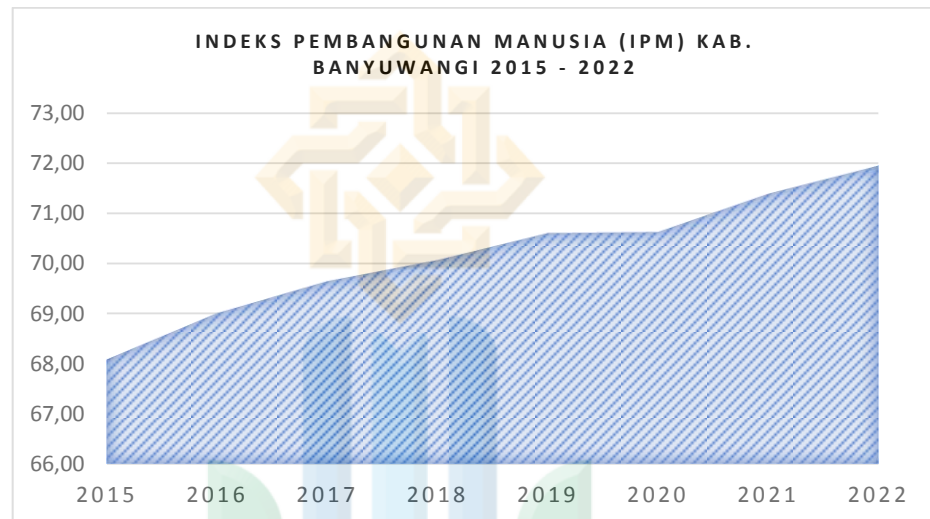
⁷⁰ Zhariaf, *wawancara*, 22 Juni 2023.

antara eksekutif dan legislatif berdasarkan pada perundang-undangan. Terdapat 3 unsur dalam laporan realisasi anggaran dasar yaitu program, anggaran dan realisasi. Program kerja dapat diartikan sebagai rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Menjadi pegangan bagi sebuah organisasi dalam menjalankan roda organisasi demi mencapai cita-cita organisasi. Program kerja akan dapat terlaksana dengan baik dan lancar jika didukung dengan adanya anggaran. Anggaran sendiri menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah (2010) adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah yang meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Adanya anggaran yang mendukung program kerja akan mewujudkan terealisasinya program kerja. Realisasi dari anggaran tersebut akan menunjukkan tingkat ketercapaian target pada periode

tertentu. Di pemerintahan program kerja disusun dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat, di mana untuk mengukur kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Dengan menggunakan Indeks Pembangunan Masyarakat akan terlihat sejauh mana realisasi anggaran dapat memberikan efek langsung bagi masyarakat luas.

Gambar 4.3
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2015 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan tiga dimensi dasar mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Dimensi kesehatan diukur dengan menggunakan angka harapan hidup waktu lahir, untuk dimensi

pengetahuan diukur dengan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, sedangkan untuk mengukur dimensi kehidupan yang layak adalah dengan menggunakan kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya

pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili pencapaian pembangunan untuk hidup layak.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Gambar 4.4

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Komponen
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 – 2022**

Komponen	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	70,03	70,11	70,19	70,34	70,54	70,65	70,72	71,06
Pengetahuan								
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,20	12,55	12,68	12,69	12,78	12,80	13,10	13,11
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	6,88	6,93	7,11	7,12	7,13	7,16	7,42	7,66
Standar Kelayakan Hidup								
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan (PPP)	10.692	11.171	11.438	11.828	12.264	12.140	12.217	12.320
IPM	68,08	69,00	69,64	70,06	70,60	70,62	71,38	71,94

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi Tahun 2022

a. Kesehatan

Kesehatan sebagai salah satu dimensi untuk mengukur Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dimensi ini merupakan salah satu

indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Semakin sehat kondisi suatu masyarakat maka akan semakin baik dalam meningkatkan tingkat produktivitas. Untuk

mendukung proses pembangunan kesehatan pada masyarakat, berbagai

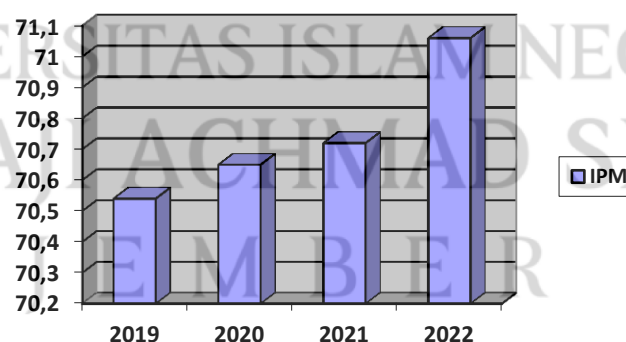
program telah dilakukan oleh pemerintah seperti memberikan

kemudahan akses pelayanan publik, meningkatkan pelayanan

kesehatan yang bermutu dan berkualitas dalam bidang kesehatan.

Pembangunan puskesmas di daerah-daerah yang memang memerlukan layanan kesehatan, yang mana sasaran utamanya adalah menurunkan tingkat angka kesakitan dan meningkatkan angka harapan hidup masyarakat. Memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu termasuk juga menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat. Untuk mengukur tingkat dimensi kesehatan, dapat dilakukan dengan melihat angka harapan hidup waktu lahir. Semakin tinggi angka harap hidup waktu lahir maka akan semakin baik pembangunan pemerintahan disuatu wilayah.

Gambar 4.5
Umur harapan hidup Penduduk Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2019 - 2022



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2022
Dimensi kesehatan dapat diukur dengan menggunakan Umur

Harapan Hidup saat lahir (UHH). Mencerminkan derajat kesehatan masyarakat sebagai indikator peluang lama usia hidup. Dari gambar

dias diketahui jika Angka harapan hidup dari tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami kenaikan secara bertahap. Tahun 2019 umur harapn hidup masyarakat banyuwangi adalah sebesar 70,54, tahun 2020 70,65, tahun 2021 70,72 dan untuk tahun 2022 meningkat berada di angka 71,06. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi, masyarakat semakin bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan. Ibu Zhariaf selaku pengelola progam dan kegiatan pemerintah Kabupaten Banyuwangi, beliau mengatakan:

“IPM atau indeks pembangunan masyarakat yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 kemarin mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini sesuai dengan harapan kami sebagai pemerintahan Banyuwangi.”⁷¹

Sejalan dengan Ibu Zhariaf, bapak Lestari selaku analisis rencana porgam dan kegiatan mengatakan:

IPM Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2015 sampai tahun 2022 kemarin memang selalu mengalami kenaikan, hal tersebut termasuk didalamnya adalah dimensi peluang hidup lama. Upaya dan usaha yang dilakukan pemerintah Banyuwangi berbuah positif. Hal tersebut tidak membuat kami lantaz lalai yang akhirnya berdampak pada kinerja kami.⁷²

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Asmuni selaku Pengadministrasian Keuangan Pemerintah banyuwangi. Beliau mengatakan:

IPM Kabupaten banyuwangi selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan mengadakan posyandu keliling, melengkapi

⁷¹ Zhariaf, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

⁷² Lestari, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023

alat kesehatan yang ada di puskesmas dan lain-lain, dan mengadakan pembangunan puskesmas di pelosok, obat-obatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Anggaran sangatlah diperlukan untuk kesehatan dengan begitu dapat memfasilitasi masyarakat dengan maksimal.⁷³

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa laporan realisasi anggaran mempunyai peran terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat dimensi Kesehatan yang dapat diukur dengan indikator Umur Harapan Hidup (UHH).

b. Pengetahuan

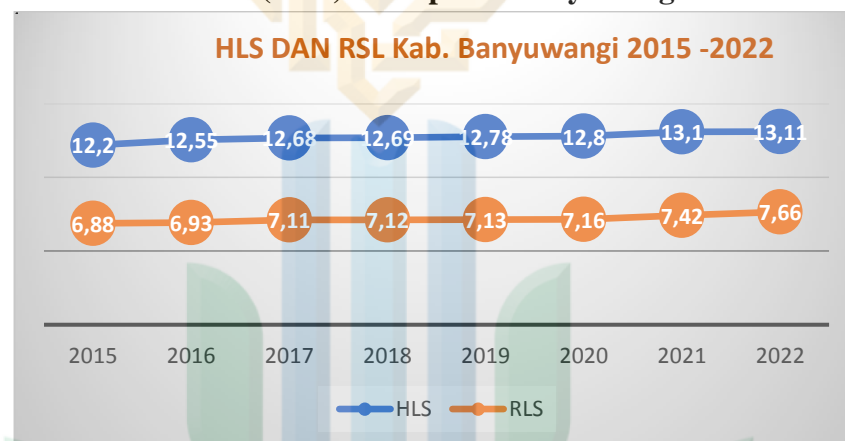
Pendidikan yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang cerdas dan kompeten. Berbagai upaya pemerintah terkait dengan peningkatan pendidikan telah dilakukan beberapa kebijakan juga dilakukan seperti memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari usia dini sampai lanjut usia.

Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan masyarakat (IPM) dibentuk oleh dua indikator, pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Kedua indikator ini di

⁷³ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 22 Juni 2023

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terus mengalami peningkatan meski pada masa Covid-19 sempat mengalami keterlambatan namun dari tahun 2015 – 2022 untuk HLS meningkat dan RLS meningkat.

Gambar 4.6
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Banyuwangi



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2022

Pertumbuhan dan peningkatan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah menunjukkan bahwa pembangunan manusia disisi pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengalami kemajuan.

Meningkatnya angka harapan sekolah merupakan sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk wilayah yang bersekolah. Untuk tahun 2022 angka harapan lama sekolah di angka 13,11 yang berarti untuk anak usia 7 tahun keatas memiliki kesempatan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang sarjana. Hal ini tentu saja merupakan hal yang baik dan telah melampaui target kebijakan wajib belajar 12 tahun.

Pertumbuhan positif pada indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi dapat diartikan kualitas sumber daya dari sisi pendidikan

yang semakin membaik akan berdampak terhadap peningkatan daya saing sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan

Dari data tersebut, bapak Lestary selaku Staff Analisis rencana program dan kegiatan, Beliau mengatakan:

Dimensi lainnya untuk mengukur IPM selain dari umur harapan hidup adalah pendidikan dengan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dari data yang sudah ada menunjukkan jika untuk indikator rata-rata lama sekolah di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2015 -2022 senantiasa mengalami kenaikan, sedangkan untuk indikator harapan lama sekolah sempat mengalami penurunan di tahun 2020, Namun secara keseluruhan sudah bisa dikatakan cukup baik.⁷⁴

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Zhariaf Beliau Mengatakan:

Indikator harapan lama sekolah mengalami kenaikan, dengan begitu program dari Pemerintah bisa dikatakan berhasil, walaupun sedikit demi sedikit setiap tahunnya mengalami kenaikan. Kesadaran yang terjadi di masyarakat akan pendidikan mulai bermunculan dan didukung pemerintah memberikan fasilitas yang memadai di dunia pendidikan.⁷⁵

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁷⁴ Lestary, wawancara, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

⁷⁵ Zhariaf, wawancara, Banyuwangi, 22 Juni 2023.

Dan berikut pendapat menurut bapak Asmuni selaku Staff Pengadministrasikan Keuangan Pemerintah Banyuwangi. Beliau mengatakan:

LRA sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan dengan adanya anggaran makan mempermudah untuk memberikan akses, atau memfasilitasi masyarakat dalam bidang pendidikan, dari anggaran tersebut dapat di gunakan untuk membangun sekolah, membeli buku-buku, dan prasarana yang di butuhkan sekolah.⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa laporan realisasi anggaran mempunyai peran terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat dimensi pendidikan yang dapat diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

c. Ekonomi

Dimensi ekonomi di sini adalah standar hidup layak yang mewakili kualitas hidup manusia yang direpresentasikan dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Standar hidup layak diukur melalui nilai pengeluaran perkapita dan kemampuan daya beli. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi secara ekonomi tercermin dari indeks pengeluaran atau indeks daya beli. Berbanding lurus, dimana semakin tinggi indeks daya beli maka semakin baik daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya.

⁷⁶ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 22 Juni 2023

Gambar 4.5
Pengeluaran Perkapita yang disesuaikan
Kabupaten Banyuwangi 2015 -2022



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Banyuwangi 2022

Tabel tersebut jika Indeks Pengeluaran Perkapita yang telah disesuaikan dari tahun 2015 – 2022 mengalami kenaikan, kecuali untuk tahun 2020 yang pada saat itu sedang terjadi pandemik Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Hal ini mampu menggambarkan jika kemampuan ekonomi masyarakat Banyuwangi semakin mambaik. Kondisi ini sejalan dengan makro

ekonomi yang ditunjukkan dari angka produk domestik regional bruto yang juga mengalami peningkatan pada periode tersebut. Bapak

Septian selaku analisis perencanaan mengatakan:

Kemampuan ekonomi masyarakat banyuwangi semakin tahun semakin membaik, untuk pengeluaran perkapita tahun 2022 masyarakat banyuwangi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, hal itu menandakan upaya pemerintah untuk meningkatkan standar hidup layak masyarakat kabupaten Banyuwangi cukup berhasil.⁷⁷

⁷⁷ Septian, *wawancara*, Banyuwangi, 15 Maret 2023.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Bapak Lestari selaku Staff Analisis Rencana Program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Beliau mengatakan:

“Ekonomi Masyarakat banyuwangi mengalami kenaikan walau dahulu sempat turun karena adanya pandemi, sekarang sudah bangkit lagi dan mulai normal kembali terus meningkat, hal tersebut adalah upaya yang di lakukan Pemerintah untuk Masyarakat.”⁷⁸

Berikut pendapat menurut bapak Asmuni Selaku Sstaff pengadministrasian Keuangan Pemerintah Banyuwangi. Beliau mengatakan:

“Banyak upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten banyuwangi untuk mewujudkan perekonomian yang stabil untuk masyarakatnya, dengan perekonomian yang stabil makan masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dengan sangat baik.”⁷⁹

Dari hasil wawancara di atas, dapat peneliti ambil kesimpulan bahwa laporan realisasi anggaran mempunyai peran terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat dimensi Ekonomi yang dapat diukur dengan Indikator pengeluaran perkapita.

C. Pembahasan Temuan

1. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pada PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP yang didalamnya terdapat Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Pernyataan standar ini mengatur pelaporan realisasi anggaran untuk tujuan umum yaitu memberikan

⁷⁸ Lestari, *wawancara*, Banyuwangi, 22 Juni 2023.

⁷⁹ Asmuni, *wawancara*, Banyuwangi, 22 Juni 2023.

informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat, dan sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dari hasil wawancara serta pengamatan dan selama melakukan pengumpulan data tentang Penerapan (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi sudah menerapkan walaupun ada beberapa transaksi yang belum terlaksana. akan tetapi unsur dari PSAP) Nomor 2 meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Belanja, Transfer, Surplus/ Defisite, Pembiayaan, dan SILPA/SIKPA. Dari beberapa unsur tersebut dalam laporan realisasi anggaran tahun 2022 Kabupaten Banyuwangi sudah sesuai yang di tentukan oleh PSAP no 2.

Akuntansi Laporan Realisasi Anggaran sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 18 yang menyebutkan jika akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja,

dan pembiayaan. Anggaran yang terdapat pada kabupaten banyuwangi membuat rancangan perencanaan, menganggaran selama satu tahun periode. Pembuatan perencanaan dilakukan dengan sangat teliti. Walaupun sudah sesuai dengan PSAK masih ada poin yang belum di terapkan seperti transaksi uang asing.

Akuntansi Belanja sesuai dengan (PSAP) No. 2 belanja di klasifikasikan menjadi belanja ekonomi, organisasi dan fungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran menurut klasifikasinya ada 3 ya, ada belanja ekonomi, organisasi dan fungsi. Belanja dalam kabupaten banyuwangi untuk klasifikasi belanja ekonomi meliputi belanja daerah, belanja pegawai, ada juga belanja operasi, belanja modal, belanja lain-lain dan ada juga belanja transfer untuk belanja transfer ini seperti belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Akuntansi transfer sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 40 menjelaskan transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mencakup wilayah memberikan supply atau aliran dana kepada daerah dengan cakupan wilayah yang lebih sempit, dengan begitu harapannya tugas dan fungsi dari pemerintahan lebih terkonsentrasi terhadap masalah yang dihadapi

Akuntansi Surplus/ Defisit sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 47 bahwa selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2022 menunjukkan Difisit. Karena terdapat perbedaan jumlah anggaran yang terdapat pada tahun 2022 dan tahun 2021 dimana mengalami kenaikan.

Akuntansi Pembiayaan sudah sesuai dengan PSAK No 2 Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui. Pembiayaan kabupaten banyuwangi berbentuk kas dimana setiap pengeluaran akan di akui ketika sedang melakukan transaksi pengeluaran pembiayaan.

Akuntansi SILPA/SIKPA sesuai dengan PSAP No. 02 paragraf 61 yaitu Selisih lebih/kurang realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. realisasi anggaran pemerintah

banyuwangi SILPA/SIKPA sudah sesuai dengan yang di anggarakan maksudnya di sini menganggarkan anggaran untuk satu tahun selanjutnya, dan jumlah sisanya tidak dikurangi atau di lebih-lebihkan dan sudah di catat dalam POS SILPA/SIKPA.

2. Hubungan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi)''

dan hal ini tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten banyuwangi.

Kesehatan sebagai salah satu dimensi untuk mengukur Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), dimensi ini merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten dan mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas, rumah sakit, polindes, dan posyandu termasuk juga menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat. Kabupaten banyuwangi mengalami kenaikan dari tahun 2015 dengan beguty harapan hidup tinggi semakin meningkat . laporan realisasi anggaran berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Masyarakat. Karena IPM sendiri tidak akan bisa tercapai dengan baik jika tidak ada anggaran yang mendukung dibelakangnya. Selain itu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Pendidikan yang merupakan cikal bakal dari terbentuknya sumber daya manusia yang handal. Dengan pendidikan yang baik akan melahirkan generasi yang cerdas dan kompeten. Dimensi pengetahuan pada Indeks Pembangunan masyarakat (IPM) dibentuk oleh dua indikator, pertama adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 Tahun, Kabupaten Banyuwangi dalam pendidikan mengalami kenaikan ada juga menalami

penurunan di rata-rata pendidikan lama. Anggaran dalam pendidikan sangat penting untuk mendukung prasarana.

Standar hidup layak di ukur melalui nilai pengeluaran perkapita dan kemampuan daya beli. Kemampuan masyarakat untuk memenuhi secara ekonomi tercermin dari indeks pengeluaran atau indeks daya beli. Ekonomi di banyuwangi tahun 2015 – 2022 mengalami kenaikan, kecuali untuk tahun 2020 yang pada saat itu sedang terjadi pandemik Covid-19, namun pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan. Hal ini mampu menggambarkan kemampuan ekonomi masyarakat Banyuwangi semakin membaik. Realisasi Anggaran yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini jelas mempunyai peran dalam upaya peningkatan berbagai sektor pembangunan.

Secara garis besar Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari beberapa indeks IPM. Dengan kenaikan itu menunjukkan jika pemerintah Kabupaten Banyuwangi berhasil dalam mengelola anggaran yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

D. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat peneliti ambil kesimpulan:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Banyuwangi Tahun Anggaran 2022 Sudah menerapkan dan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran. Laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah menyajikan informasi terkait dengan akuntansi anggaran, yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Akuntansi pendapatan, akuntansi belanja yang meliputi belanja daerah, belanja pegawai, ada juga belanja operasi, belanja modal. Akuntansi transfer, akuntansi defisit/surplus, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih atau kurang sisa pembiayaan.
2. Hubungan antara Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi adalah memang benar memiliki hubungan yang berkaitan. Dimana untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan IPM atau Indeks Pembangunan Masyarakat. Laporan realisasi anggaran terdapat 3 unsur dasar yaitu program, anggaran dan realisasi. Program kerja dapat diartikan sebagai rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu.

Digunakan sebagai pegangan untuk mencapai cita-cita organisasi. Progam kerja yang telah buat sebelumnya dapat terlaksana jika di dukung dengan adanya anggaran yang cukup, dan dengan progam kerja yang terlaksana tersebut maka realisasi dan cita-cita organisasi akan tercapai.

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) mengukur pencapaian pembangunan manusia berbasiskan sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Dengan tiga dimensi dasar mencakup kesehatan dengan indikator umur panjang dan sehat, pengetahuan dengan indiktaor harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) dan Dimensi ekonomi dengan indikator kehidupan yang layak.

E. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk tetap berusaha meningkatkan Kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banyuwangi setiap tahunnya. Keberhasilan tahun-tahun sebelumnya diharapkan dapat dijadikan sebagai penyemangat dalam upaya-upaya semakin mensejahterahkan masyarakat.
2. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diharapkan untuk tetap menerapkan PSAP No. 2 tentang laporan realiasi anggaran dengan komponen-komponen yang sudah di atur di dalamnya.
3. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber referensi serta menggali lebih dalam lagi informasi mengenai mata uang asing, agar mendapat hasil penelitian yang lebih baik dan dilakukan penelitian lebih lanjut ditempat yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, Nunuy Nur. 2010. *Akuntansi Pemerintah, Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana.
- Asmianti, Siti. Stanley k. Walandouw. 2018. *Evaluasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Tentang Penyajian Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA Vol 3 No 1 Maret (2015), Hal 418-425, ISSN 2303-1174.
- Basrow. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Bungis, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Yanti Theresa. 2019. *Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasibuan, Dini Rahmi. 2019. *Analisis Penerapan Penuh Peraturan Nomor 71 Tahun 2010 Tentang SAP Berbasis Akrua (Kota Medan)*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Henryanto, Wijaya. 2010. *Standar Akuntansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi X II No. 3.
- Hikmah, Dewi Man Zilatul. 2019. *Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas Terhadap Laporan Keuangan Desa di Desa*

Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.

<http://bappeda.banyuwangikab.go.id/>

<https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/02/01/2023/ipm>

[banyuwangi-naik-056-persen/](https://radarbanyuwangi.jawapos.com/politik-pemerintahan/02/01/2023/ipm-banyuwangi-naik-056-persen/)

Hubberman. Miles. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Ui Press, 1992.

Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kesejahteraan Sosial*.

Ikhshan, Arfan. 2014. *Pengantar Akuntansi*". Bandung: Citapusaka Media.

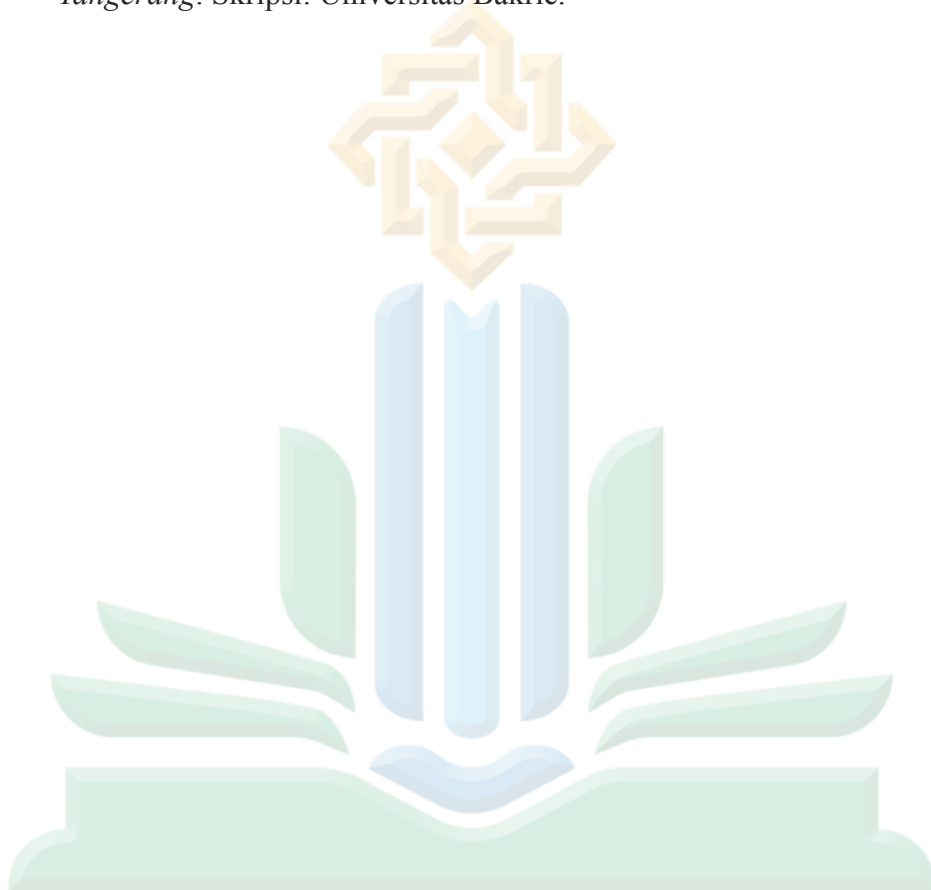
Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, L. J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosada Karya.

Mulyana 2009. *Penggunaan Akuntansi Akrual di Negara-Negara lain*. Tren di Negara-Negara OECD.

Mutiara, Yohanna Crecensia. Minarni A. Dethan, Nikson Tameno. 2022. *Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 tentang Laporan Realisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol 1 No 7 Oktober.

Oktavani, Maulida. 2020. *Hubungan Penerapan PSAP No.2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Dengan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat DiKota Tangerang*. Skripsi: Universitas Bakrie.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rita Nurhayati
Nim : E20163021
Prodi/Jurusan : Akuntansi Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi).**” adalah benar-benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Jember 19 Juni 2023
Saya yang menyatakan

Rita Nurhayati
E20163021



Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi)	1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran 2. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (IPM)	1. Informasi Laporan realiasi anggaran dalam PSA No. 02 1. Kesehatan 2. Pengelahuan 3. Ekonomi	1. Akuntansi Anggaran 2. Anggaran Pendapatan 3. Akuntansi Belanja anggaran 4. Akuntansi Transfer 5. Akuntansi Defisit / Surplus 6. Akuntansi Pembiayaan 7. Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Anggaran Pembiayaan (siKPA / SiLPA) 8. Umur Harapan Hidup 9. Harapan Lama Sekolah (HLS) 10. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) 11. Standar Layak Hidup	1. Metode Penelitian: Kualitatif 2. Pendekatan Penelitian : Penelitian Deskriptif 3. Subjek Penelitian: a. Staff (Pengadministrasian Keuangan) b. Staff (Analisis Rencana Program dan Kegiatan) c. Staff (Analisis Perencanaan) d. Staff (Pengelola Program dan Kegiatan) 4. Teknik Pengumpulan Data: a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 5. Analisis Data : a. Reduksi data b. Penyajian data c. Verifikasi 6. Keabsahan Data: Triangulasi Sumber	1. Bagaimana Penerapan PSAP Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana Hubungan Penerapan PSAP Nomor 2 Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi?

Pedoman Wawancara

A. Observasi

- 1 Letak Lokasi Penelitian
- 2 Situasi Dan Kondisi Geografis Obyek Penelitian
- 3 Laporan Keuangan Kabupaten Banyuwangi

B. Wawancara

- 1 Apakah Laporan Keuangan Kabupaten Bayuwangi sudah Transparan.
- 2 Apakah Laporan Keuangan Kabupaten Bayuwangi Sudah Tertib Dan Disiplin
- 3 Apakah Di Kabupaten Sudah Menerapkan Pendapatan LRA
- 4 Belanja Di Kabupaten Banyuwangi Bagaimana
- 5 Apakah Di Kabupaten Banyuwangi Sudah Menerapkan Transfer
- 6 Surplus/Defisit Di Kabupaten Banyuwangi Bagaimana
- 7 Bagaimana SILPA Di Kabupaten Banyuwangi
- 8 Bagaimana Hubunga LRA Dengan Keseharan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi
- 9 Bagaimana Hubungan LRA Dengan Pengetahuan di Kabupaten Banyuwangi
- 10 Bagaimana Hubungan Lra Dengan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi

C Dokumentasi

- 1 Visi Dan Misi Kabupeten Banyuwangi
- 2 Struktur Organisasi
- 3 Laporan Keuangan Kabupeten Banyuwangi
- 4 Foto-Foto Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136
Website : www.http://febi.iain-jember.ac.id e-mail : febi.iainjbr@gmail.com

Nomor : B./In.20/7.d/PP.00.9/20/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

20 Oktober 2021

Yth. PIMPINAN BADAN PER DAERAH
Di BANYUWANGi

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rita Nurhayati
NIM : E201613021
Semester : XI (SEBELAS)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Hubungan Pernyataa Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No. 02 hari di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jurnal Kegiatan penelitian

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	15 Februari 2023	Memasukkan Surat Ijin Penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Banyuwangi	
2	6 Maret 2023	Wawancara mengenai Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi. Kepada bapak Ismani	
3	7 Maret 2023	Hubungan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Banyuwangi)". Kepada Bapak Septian.	



Banyuwangi , 7 Maret 2023
Mengetahui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS

Nama : Rita Nurhayati
NIM : E20163021
Tempat Tanggal lahir : Banyuwangi, 4 September 1998
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Isiam/ Akuntansi Syariah
Alamat RT/RW : 031/006
Kel/Desa : Kedungasri
Kecamatan : Tegaldlimo
Kabupaten : Banyuwangi



Riwayat Pendidikan :

SD : Sekolah Dasar Negeri 3 Kedungasri
SMP : MTS Silahul Muslimin
SMA : Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Darul Ulum Muncar
Banyuwangi
Perguruan Tinggi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R